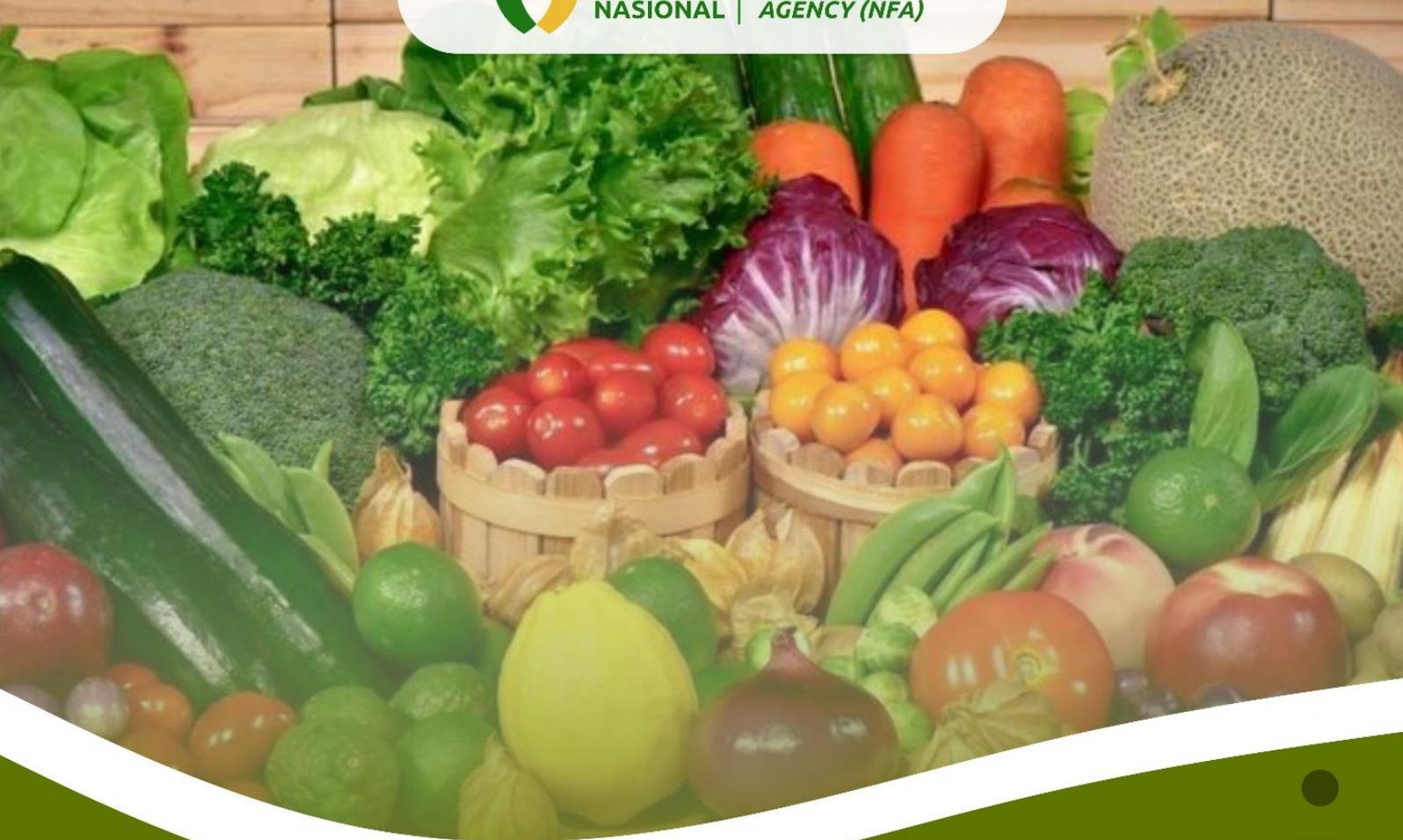




BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

NATIONAL  
FOOD  
AGENCY (NFA)



# Laporan Bulanan

## MEI 2025

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi  
dan Keamanan Pangan



Badan Pangan Nasional

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya sehingga “Laporan Bulan Mei 2025 Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan” dapat diselesaikan.

Laporan ini berisikan program dan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kegiatan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dilaksanakan pada bulan Mei 2025 sebagai bentuk implementasi kegiatan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Kami menyadari laporan ini masih belum sempurna, karena itu saran untuk perbaikan pada periode berikutnya sangat diharapkan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program kegiatan dan semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Jakarta, Juni 2025

Deputi Bidang Penganekaragaman  
Konsumsi dan Keamanan Pangan



Andriko Noto Susanto

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>DAFTAR ISI</b>   | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  | <b>1</b>   |
| <i>I.1 Latar Belakang</i>   | 1          |
| <i>I.2 Tujuan</i>   | 2          |
| <i>I.3 Metodologi Penyusunan Laporan</i>  | 2          |
| <b>BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT</b>  | <b>3</b>   |
| <b>BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN</b>   | <b>5</b>   |
| <i>III.1 Realisasi Fisik dan Keuangan</i>   | 5          |
| <i>III.2 Monitoring Kegiatan Prioritas</i>  | 11         |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>   | <b>35</b>  |
| <i>IV.1 Kesimpulan</i>  | 35         |
| <i>IV.2 Permasalahan</i>  | 35         |
| <i>IV.3 Rekomendasi</i>   | 35         |
| <b>LAMPIRAN</b>   | <b>36</b>  |
| <i>Lampiran 1 Lembar III DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2024</i>  | 37         |
| <i>Lampiran 2. Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan Januari Tahun 2025 Sesuai Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan</i> | 38         |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pada tahun 2025, Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu: 1) pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 2) pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan; 3) pemantapan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan 4) dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional. Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA-125.01.1.690590/2025 tanggal 2 Desember 2024 Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mendapat alokasi anggaran Rp. 40.284.839.000,- (Empat Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Hasil dari pemantauan dan evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Mei Tahun 2025 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan posisi bulan Mei tahun 2025. Laporan ini sebagai catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan Mei Tahun 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bulan Mei tahun 2025 baik fisik maupun keuangan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Badan Pangan Nasional pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

## **I.2 Tujuan**

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan posisi bulan Mei Tahun 2025.
2. Mengetahui realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan Mei Tahun 2025.

## **I.3 Metodologi Penyusunan Laporan**

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.

## BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Mei tahun 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi 6 Tanggal 28 April 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan Januari ditargetkan sebesar 2,13%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Deputi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bulan Mei 2025 Sesuai DIPA Revisi 6

| Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen                                  |   |   | Alokasi Tahun 2025                |                         | Target Bulan Mei 2025       |                         |
|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Program, Kegiatan & KRO  | RO/Output   | Komponen  | Anggaran (Rp)                     | Fisik                   | Keuangan (Rp) 2,13%         | Fisik                   |
| <b>6877 Pemantapan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan</b> |   |   | 40.284.839.000<br>12.333.462.000* |                         | 858.067.071<br>262.702.741* |                         |
| ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan                        | Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan  | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan                                 | 1.243.760.000<br>679.000.000*     | 9 rekomendasi kebijakan | 26.492.088<br>14.462.700*   | 0 rekomendasi kebijakan |
| AEA- Koordinasi  | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Panganekaragaman Konsumsi Pangan                         | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Panganekaragaman Konsumsi Pangan                         | 7.860.000.000<br>1,635,382,000*   | 10 kegiatan             | 167.418.000<br>34.833.637*  | 1 Kegiatan              |
|  | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 4.628.480.000<br>1.264.060.000*   | 9 kegiatan              | 98.586.624<br>26.924.478*   | 0 Kegiatan              |
|  | Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan                         | Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan                         | 4.860.650.000<br>391.010.000*     | 3 Kegiatan              | 103.531.845<br>8.328.513*   | 0 Kegiatan              |

| Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen              |  |   | Alokasi Tahun 2025              |                       | Target Bulan Mei 2025     |                       |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Program, Kegiatan & KRO                          | RO/Output  | Komponen  | Anggaran (Rp)                   | Fisik                 | Keuangan (Rp) 2,13%       | Fisik                 |
| AFA-Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria        | NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan  | Penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan  | 600.000.000<br>46,825,000*      | 3 NSPK                | 12.780.000<br>997.373     | 0 NSPK                |
|  | NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan         | Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan | 1.000.000.000<br>276.550.000*   | 5 NSPK                | 21.300.000<br>5.890.515*  | 0 NSPK                |
|  | NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan   | Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan   | 300.000.000<br>211.400.000*     | 3 NSPK                | 6.390.000<br>4.502.820*   | 0 NSPK                |
| BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM                | UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan                             | Pengembangan Usaha Pangan Lokal   | 2.000.000.000<br>1,176,595,000* | 10 UMKM               | 42,600,000<br>25.061.474* | 0 UMKM                |
| PCA-Perizinan Produk                             | Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan | Sertifikasi dan registrasi  | 2.500.000.000<br>722.860.000*   | 500 Produk            | 53.250.000<br>15.396.918* | 11 Produk             |
| PEH-Promosi                                      | Promosi Pangan B2SA  | Promosi Pangan B2SA   | 3.500.000.000<br>1,075,400,000* | 1 Kegiatan            | 74.550.000<br>22.906.020* | 1 Kegiatan            |
| QDB-Fasilitas dan Pembinaan Lembaga              | Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman   | Operasional pasar pangan segar aman Pusat   | 904.729.000<br>60.100.000*      | 1 Lembaga             | 19.270.727<br>1.280.130*  | 0 Lembaga             |
|  | Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina  | Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang Dibina  | 1.499.760.000<br>707.390.000*   | 22 lembaga            | 31.944.888<br>15.067.407* | 7 Lembaga             |
| QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan                           | Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan                              | 684.460.000<br>116,250,000*     | 1 Kelompok Masyarakat | 14.578.998<br>2.476.125*  | 0 Kelompok Masyarakat |
| QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk           | Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan                               | Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan                                  | 2.998.000.000<br>1.389.630.000* | 1 Laporan             | 63.857.400<br>29.599.119* | 0 Laporan             |
| QMA-Data dan Informasi Publik                    | Data Situasi Konsumsi Pangan   | Data Situasi Konsumsi Pangan  | 1.500.000.000<br>356,010,000*   | 1 Data                | 31.950.000<br>7.583.013*  | 0 Data                |

| Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen                         |                                 |  | Alokasi Tahun 2025              |                   | Target Bulan Mei 2025     |        |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------|--------|
| Program, Kegiatan & KRO                                     | RO/Output                       | Komponen                                   | Anggaran (Rp)                   | Fisik             | Keuangan (Rp) 2,13%       | Fisik  |
| RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Sarana Keamanan dan Mutu Pangan | Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan | 4.205.000.000<br>2.225.000.000* | 4 Unit<br>2 Unit* | 89.566.500<br>47.392.500* | 0 Unit |

Catatan: \* : Anggaran setelah dikurangi blokir (berdasarkan aplikasi SAKTI)

## BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

### III.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun anggaran 2025, Nomor DIPA 125.01.1.690590/2025 tanggal 5 Desember 2024 Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 40.284.839.000,-. Pada Bulan Januari 2025, terjadi revisi DIPA berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana efisiensi belanja Badan Pangan Nasional sebesar 60,16%. Sehubungan dengan hal tersebut, anggaran Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dapat dibelanjakan pada bulan Mei 2025 adalah sebesar Rp. 12.333.462.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Realisasi keuangan pada bulan Mei Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Mei Tahun 2025 Per Output dan Komponen Lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

| Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen           |  |   | Target (2,13%)              |                         | Realisasi Bulan Mei 2025         |  | Realisasi SP2D hingga Mei 2025 |       |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-------|
| Program, Kegiatan & KRO                       | RO/Output  | Komponen  | Keuangan (Rp)               | Fisik                   | Keuangan (Rp)                    | Fisik  | Keuangan (Rp)                  | Fisik |
|   |  |   | 858.067.071<br>262.702.741* |                         | 728.413.410                      |  | 1.753.790138                   |       |
| ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan |  |   |                             |                         |                                  |  |                                |       |
|   | Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan | 26.492.088<br>14.462.700*   | 0 rekomendasi kebijakan | 22.357.389<br>(3,3%)<br>(154,6%) | 0 rekomendasi kebijakan<br><br>Kegiatan ini sdh realisasi di Bln Mei, dan mjd bagian dari kegiatan sblmnya (sdh diklaim di bln sblmnya), yaitu:<br>1. Kajian formaldehida pada Pangan Segar (sampling dan pengujian lab)<br><br>2. Kajian komposisi gizi pada pangan segar (proses analisis hsl pengujian)<br><br>3. Dua Kertas posisi Indonesia pada CL | 26.957.389<br>(3,97%)          |       |

| Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen |   |   | Target (2,13%)             |            | Realisasi Bulan Mei 2025           |  | Realisasi SP2D hingga Mei 2025 |            |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| Program, Kegiatan & KRO             | RO/Output   | Komponen  | Keuangan (Rp)              | Fisik      | Keuangan (Rp)                      | Fisik  | Keuangan (Rp)                  | Fisik      |
|                                     |   |   |                            |            |                                    | <p>untuk sidang CCCF ke-18</p> <p>4. Rekomendasi keamanan dan mutu pangan untuk pelaku usaha dan OKKPD.</p> <p>5. Harmonisasi standar keamanan dan mutu pangan, dg mengikuti sidang codex dan badan internasional lainnya (EWG CCFICS dan ACCSQ PFPWG)</p> |                                |            |
| AEA-Koordinasi                      | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan | 167.418.000<br>34.833.637* | 1 Kegiatan | 348,144,613                        | 1 Kegiatan:<br>Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024   | 537,078,465                    | 1 Kegiatan |
|                                     | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan          | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan          | 98.586.624<br>26.924.478*  | 0 kegiatan | 215.830.369<br>(26,8%)<br>(596,1%) | 0 kegiatan<br><br>Realisasi kegiatan masih nol, namun telah dilaksanakan persiapan kegiatan  | 366.222.017<br>(28,9%)         | 0 kegiatan |

| Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen        |  |  | Target (2,13%)            |            | Realisasi Bulan Mei 2025        |  | Realisasi SP2D hingga Mei 2025 |                         |
|--|--|--|---------------------------|------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| Program, Kegiatan & KRO                    | RO/Output  | Komponen   | Keuangan (Rp)             | Fisik      | Keuangan (Rp)                   | Fisik  | Keuangan (Rp)                  | Fisik                   |
|  | Standar Keamanan dan Mutu Pangan   | Standar Keamanan dan Mutu Pangan   |                           |            |                                 | Bimtek Keamanan Pangan   |                                |                         |
|  | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 103.531.845<br>8.328.513* | 0 Kegiatan | 1.728.304                       | 0 kegiatan<br>(1 Rapat)  | 92.320.906<br>(23.61%)         | 0 kegiatan<br>(1 Rapat) |
| AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan  | Penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan   | 12.780.000<br>997.373     | 0 NSPK     | 0                               | 0 NSPK   | 46.619.345                     | 3 NSPK                  |
|  | NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan                           | Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan                | 21.300.000<br>5.890.515*  | 0 NSPK     | 7.300.000<br>(2,6%0<br>(123,9%) | 0 NSPK<br>Realisasi kegiatan masih nol, namun telah berproses pada penyusunan bbrp standar, yaitu:<br>1. Standar RSNI beras Forifikasi sedang dalam proses jejak pendapat<br>2. RPP 86 dalam | 7.300.000<br>(2,6%0            | 0 NSPK                  |

| Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen |  |   | Target (2,13%)            |            | Realisasi Bulan Mei 2025 |   | Realisasi SP2D hingga Mei 2025 |                                |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------|------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Program, Kegiatan & KRO             | RO/Output  | Komponen  | Keuangan (Rp)             | Fisik      | Keuangan (Rp)            | Fisik   | Keuangan (Rp)                  | Fisik                          |
|                                     |  |   |                           |            |                          | proses paraf K/L dan penetapan  |                                |                                |
|                                     | NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan   | Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan | 6.390.000<br>4.502.820*   | 0 NSPK     | 0                        | 0 NSPK  | 0                              | 0 NSPK                         |
| BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM   | UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaraga man pangan                            | Pengembangan Usaha Pangan Lokal                     | 42,600,000<br>25.061.474* | 0`         | 1,490,000                | 0 UMKM - tahap identifikasi calon penerima manfaat  | 1,490,000                      | 0                              |
| PCA-Perizinan Produk                | Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan | Sertifikasi dan registrasi                          | 53.250.000<br>15.396.918* | 11 Produk  | 17.771.484               | 151 produk Izin Edar (3 Rapat)  | 119.415.892 (16.52%)           | 151 produk Izin Edar (3 Rapat) |
| PEH-Promosi                         | Promosi Pangan B2SA  | Promosi Pangan B2SA                                 | 74,550,000<br>22,906,020* | 1 Kegiatan | 122,445,121              | 1 Kegiatan:<br>a. Kegiatan BGtS di SMAN 5 Tambun Selatan, 07 Mei 2025.<br>b. Sosialisasi B2SA bersama Kader Pangan Aman | 237,265,219                    | 1 Kegiatan                     |

| Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen              |   |   | Target (2,13%)            |                       | Realisasi Bulan Mei 2025        |   | Realisasi SP2D hingga Mei 2025 |                        |
|--|---|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| Program, Kegiatan & KRO                          | RO/Output   | Komponen  | Keuangan (Rp)             | Fisik                 | Keuangan (Rp)                   | Fisik   | Keuangan (Rp)                  | Fisik                  |
|  |   |   |                           |                       |                                 | Sehat untuk Hebat Kota Tangerang, 27 Mei 2025.  |                                |                        |
| QDB-Fasilitas dan Pembinaan Lembaga              | Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman                | Operasional pasar pangan segar aman Pusat                       | 19.270.727<br>1.280.130*  | 0 Lembaga             | 0                               | 0 Lembaga   | 12.490.106<br>(20,78%)         | 0 Lembaga              |
|  | Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina                   | Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang Dibina            | 31.944.888<br>15.067.407* | 0 lembaga             | 38.699.080<br>(5,5%)<br>256,8%) | 7 lembaga<br>1. NTB<br>2. Kalimantan Selatan<br>3. Sulawesi Tenggara<br>4. Papua<br>5. Papua Barat<br>6. Bangka Belitung<br>7. Kalimantan Barat | 109.484.530<br>(15,48%)        |                        |
| QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan | Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan | 14,578,998<br>2,476,125*  | 0 Kelompok Masyarakat | 7,992,000                       | 7,992,000   | 7,992,000                      | 0                      |
| QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk           | Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan      | Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan      | 63.857.400<br>29.599.119* | 0 Laporan             | 0                               | 0 Laporan<br>(1 Rapat)  | 284.140.769<br>(20.45%)        | 0 Laporan<br>(1 Rapat) |

| Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen                         |                                 |  | Target (2,13%)            |        | Realisasi Bulan Mei 2025 |                                     | Realisasi SP2D hingga Mei 2025 |        |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Program, Kegiatan & KRO                                     | RO/Output                       | Komponen                                   | Keuangan (Rp)             | Fisik  | Keuangan (Rp)            | Fisik                               | Keuangan (Rp)                  | Fisik  |
| QMA-Data dan Informasi Publik                               | Data Situasi Konsumsi Pangan    | Data Situasi Konsumsi Pangan               | 31,950,000<br>7,583,013*  | 0      | 0                        | 0<br>identifikasi ketersediaan data | 0                              | 0      |
| RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Sarana Keamanan dan Mutu Pangan | Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan | 89.566.500<br>47.392.500* | 0 Unit | 0                        | 0 Unit                              | 0                              | 0 Unit |

Catatan: \* : Target realisasi berdasarkan anggaran setelah dikurangi blokir

Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan pada output/RO dan komponen lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional posisi bulan Mei Tahun 2025 sebagaimana tabel di atas, realisasi anggaran per bulan Mei Tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sebesar Rp. 51.117.845,- atau (0,18%) dari target 2,13% berdasarkan anggaran setelah dikurangi blokir. Realisasi anggaran per Direktorat sampai dengan bulan Mei 2025 sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 3. Realisasi Keuangan Direktorat Lingkup Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bulan Mei Tahun 2025

| No          | Uraian   | PAGU TA 2025 (Rp)     |                       | Realisasi Mei 2025   |               | Realisasi SP2D    |              |              | Sisa Anggaran         |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
|             |  | DIPA                  | Revisi                | Rp                   | % Revisi      | Rp                | % DIPA       | % Revisi     |                       |
| HA.<br>6877 | <b>Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi Pangan</b>           | <b>40.284.839.000</b> | <b>12.333.462.000</b> | <b>1.753.790.138</b> | <b>12,22%</b> | <b>51.117.845</b> | <b>0,13%</b> | <b>0,18%</b> | <b>10.579.671.862</b> |
|             | Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi Pangan                     | 16.144.460.000        | 4.406.462.000         | 480.071.734          | 10.89%        | 830.445.029       | 5.14%        | 18.85%       | 3.576.016.971         |
|             | Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan            | 8.372.000.000         | 2.927.000.000         | 284.186.838          | 9,71%         | 509.963.936       | 6,09%        | 17,42%       | 2.417.036.064         |
|             | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 15.768.379.000        | 5.000.000.000         | 19.499.788           | 0,39%         | 413.381.173       | %            | 8.27%        | 4.586.618.827         |

Sumber: Data SAKTI Kementerian Keuangan

Dari tabel 3 di atas, realisasi keuangan Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sampai dengan bulan Mei 2025 mencapai 0,13% atau sebesar 0,18% berdasarkan PAGU Revisi.

## **III.2 Monitoring Kegiatan Prioritas**

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selama bulan Januari Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

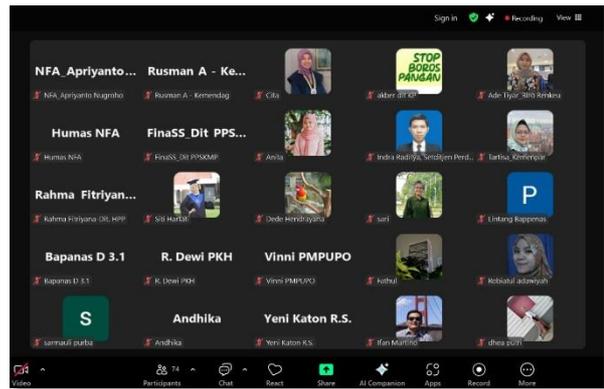
### **III.2.1 Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan**

#### **A. Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan**

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024, 09 Mei 2025 Dalam rangka update nomenklatur Kementerian/Lembaga dan target indikator telah dilaksanakan Rapat Koordinasi tingkat K/L terkait perkembangan implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal secara daring pada tanggal 9 Mei 2025. Rakor di hadiri oleh perwakilan K/L yang bertanggung jawab dan pendukung pelaksana strategi nasional dan rencana aksi percepatan penganekaragaman pangan beserta perwakilan dari K/L baru (Kemenko Pangan).

Berdasarkan Rakor tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perkembangan implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 dari Kementerian/ Lembaga diharapkan Badan Pangan Nasional dapat melaporkan ke Presiden pada Bulan Agustus 2025 yang bertepatan satu tahun keluarnya Perpres tersebut;
- b. Pembentukan Tim Nasional Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal perlu segera dibentuk dengan anggota yang disesuaikan nomenklatur Kementerian/Lembaga terbaru;
- c. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penganekaragaman Pangan perlu digabung dengan RAP Pangan dan Gizi, karena di daerah banyak Rencana Aksi Daerah yang perlu disusun;
- d. Dalam mendukung kinerja Tim Monitoring Nasional perlu disusun Petunjuk Teknis Monitoring oleh Badan Pangan Nasional;
- e. Menindaklanjuti dari Rakor ini, kedeputan 3 akan mengirim surat kepada Kementerian/Lembaga untuk meminta laporan terkait perkembangan implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) dalam Perpres tersebut.



## **B. Promosi Pangan B2SA**

### **1. Kegiatan BGtS di SMAN 5 Tambun Selatan, 07 Mei 2025**

Kegiatan B2SA Goes To School di SMAN 5 Tambun Selatan dilaksanakan berkerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi dan dihadiri oleh 250 orang yang terdiri dari 200 siswa SMA N 5 Tambun Selatan dan 50 orang guru serta staf sekolah. Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi dan dihadiri juga oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi BGTS SMAN 5 Tambun Selatan menghadirkan Dr. Rita Ramayulis (Ahli Gizi)

Diektorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan memberikan dukungan sosialisasi konsumsi pangan B2SA kepada siswadan membagikan merchandise B2SA berupa mug B2SA dan kaos B2SA. Pada kesempatan tersebut Dr. Rita Ramayulis menyampaikan menganekaragaman makanan pokok, sesuai dengan kebutuhan tubuh dan gizi seimbang; mengonsumsi makanan yang tinggi protein untuk pertumbuhan, mengurangi makanan yang tinggi Gula Garam dan Lemak seperti snack berkemasan, minuman berasa, dan gorengan. Melalui kegiatan BGTS ini diharapkan generasi muda akan mengerti dan merubah pola konsumsinya menjadi konsumsi prinsip B2SA, agar dapat menghasilkan generasi emas.



## 2. Kegiatan BGtS di Pondok Pesantren Al-Amin Ngasinan Kediri, 15 Mei 2025

Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA pada B2SA Goes to School di Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan Kota Kediri. Kegiatan B2SA Goes to School dibuka oleh Penanggung Jawab Kegiatan yaitu Gus Muhamad Faried Mutaqien Iskandar. Gus Faried menghimbau untuk para santri agar melek terkait gizi dan Kesehatan.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Andriko Noto Susanto, SP., M.P. memberikan arahan bahwa lingkungan pendidikan menjadi tempat strategis untuk memulai perubahan sosial, termasuk dalam membentuk kebiasaan makan yang mendukung tumbuh kembang optimal. Melalui edukasi interaktif dan pendekatan berbasis nilai, para santri diajak untuk memahami bahwa pola makan tidak sekadar soal rasa kenyang, melainkan berkaitan erat dengan kualitas kesehatan fisik dan mental, perkembangan intelektual, serta ketahanan tubuh.

Pimpinan Pondok Pesantren Al Amien yang juga merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Muhamad Anwar Iskandar menjelaskan bahwa konsep B2SA selaras dengan prinsip konsumsi yang baik dalam banyak ajaran, termasuk dalam agama Islam yang menganjurkan makanan halal dan thayyiban. Halal dan baik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, makanan tidak hanya halal, melainkan baik untuk Kesehatan salah satunya harus proporsional / memperhatikan porsi dan keseimbangan antar kelompok pangan.

Sosialisasi B2SA kepada para santri dilakukan dengan edukasi interaktif dengan games sehingga para santri terlibat antusias. Setelah menjelaskan konsep B2SA, santri diminta

mencoba menyusun menu B2SA pada isi piringku dengan food model. Dengan praktik langsung, harapannya mereka mengerti dan faham . Selain itu, setelah sosialisasi para santri diberikan konsumsi B2SA sebanyak 1000 box, agar mereka bisa melihat langsung menu B2SA. Pola Konsumsi B2SA harapannya dapat diterapkan oleh Pondok Pesantren dalam Menyusun menu makanan di pondok, dan juga para siswa agar mempraktikkannya ketika makan.



### **3. Sosialisasi B2SA dan mengikuti pengukuhan Ka' Asuh (Kader Pangan Aman Sehat untuk Hebat), 27 Mei 2025**

Kegiatan sosialisasi B2SA dan mengikuti pengukuhan \*Ka' Asuh (Kader Pangan Aman Sehat untuk Hebat) dilakukan pada hari Selasa 27 Mei 2025 di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Dalam rangka edukasi konsumsi pangan B2SA, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang melaksanakan kegiatan pengukuhan Ka' Asuh yang dilanjutkan dengan sosialisasi B2SA di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Pada kegiatan ini hadir Deputy Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Walikota Tangerang, perwakilan OPD terkait, guru dari 30 sekolah, serta 60 orang siswa yang dikukuhkan sebagai Ka' Asuh. Deputy Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Ka' Asuh memiliki peran penting dalam rangka mengajak masyarakat, khususnya para siswa, untuk menerapkan konsumsi pangan B2SA dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Perpres 81/2024, namun demikian daerah juga didorong untuk menyusun regulasi terkait sesuai mandat pada Perpres 81/2024.

Badan Pangan Nasional memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tangerang yang berkomitmen melakukan sosialisasi B2SA melalui kegiatan \*B2SA Goes to School (BGTS) di 30 sekolah dengan menggunakan dana APBD\*. Selain itu saat ini juga tersedia \*21 titik Pojok Uji Keamanan Pangan Segar\* yang tersebar di pasar modern dan tradisional di Kota Tangerang yang menyediakan pengujian bahan pangan on the spot dan gratis. Setelah pengukuhan 60 siswa sebagai Ka' Asuh oleh Walikota Tangerang, Badan Pangan Nasional memberikan sosialisasi terkait Konsumsi Pangan B2SA untuk Generasi Emas Indonesia dan Implementasi Praktis Keamanan Pangan.



## **C. Pengembangan Usaha Pengelolaan Pangan Lokal**

### **1. Survei ketersediaan mie mocaf sebagai Alternatif Komoditas Bantuan Pangan Intervensi Penanganan Kerawanan Pangan (IPKP) TA 2025 di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, 21-23 Mei 2025**

Pada tahun 2025 kegiatan Intervensi Penanganan Kerawanan Pangan dilaksanakan di provinsi Jawa Tengah (4 Kabupaten) dan di DI Yogyakarta (1 Kabupaten) dengan total penerima bantuan sebanyak 11.500 KK. Data penerima manfaat bersumber dari BNBA Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Bappenas. Dalam rangka pemanfaatan pangan lokal (Mie Mocaf) bantuan IPKP 2025 direncanakan menggunakan pangan lokal (mie mocaf) dalam paket bantuan pangan IPKP 2025.

Untuk mengetahui ketersediaan pangan lokal (mie mocaf) yang meliputi mengenai kapasitas produksi, stok dan harga dilaksanakan survey kepada pelaku usaha sebagai produsen olahan pangan lokal di Jawa Tengah (CV. Raharjo Indokarya) dan DI Yogyakarta (UMKM Putri 21).

CV Rahardjo Indokarya merupakan UMKM yang bergerak di bidang budidaya singkong sampai pengolahannya menjadi tepung mocaf dan produk turunannya, salah satunya mie mocaf. UMKM ini memproduksi mie mocaf dalam bentuk mie telur, mie instan, dan mie seduh dengan merek dagang "Djawa Mie" dan "Inamie". Selain itu, UMKM ini juga menjadi mitra maklon untuk produk mie mocaf lainnya, termasuk menjadi lokasi produksi mie mocaf yang menjadi CPPD provinsi Jawa Tengah.

Informasi mengenai produk, adalah sebagai berikut:

- Kapasitas produksi tepung mocaf mencapai 800-1.000 kg/hari, sedangkan produksi mie mocaf dapat mencapai 80.000 bungkus/hari.
- Bahan baku tepung mocaf tidak hanya berasal dari daerah lokal, tetapi juga dipasok dari luar Jawa, seperti Pekanbaru dan NTT, sehingga ketersediaannya tetap terjaga.
- Pemasaran produk dilakukan secara B2B berdasarkan pesanan (PO), sementara penjualan ke pasar umum untuk konsumen dilakukan melalui agen distributor. Beberapa maklon yg bekerjasama telah memasarkan produknya hingga ekspor ke beberapa Negara.
- Produk telah memiliki izin PIRT serta sertifikasi halal sebagai jaminan keamanan dan kehalalan bagi konsumen.
- Produk memiliki variasi gramasi: 70-75 gram untuk kemasan mie instan, serta 100 gram dan 200 gram untuk kemasan mie telur (tanpa bumbu). Tersedia juga mie telur varian fortifikasi dengan sayuran seperti ubi ungu, wortel, bayam, tomat, daun kelor dll. Pemesanan produk dapat disesuaikan sesuai permintaan (custom) dengan kriteria tertentu.

Kunjungan lapangan di provinsi DI Yogyakarta dilaksanakan ke UKM Putri 21 yang merupakan UMKM yang berfokus pada produk olahan mocaf, seperti mie mocaf dalam bentuk mie telur, mie instan, dan mie seduh dengan merek dagang "Mie Ayo" dan beras mocaf.

Informasi mengenai produk, adalah sebagai berikut:

- Kapasitas produksi mie mocaf sekitar 300-500 bungkus/hari
- Bahan baku tepung mocaf hanya berasal dari Poktan/Gapoktan mocaf di Gunung Kidul,
- Produksi mie mocaf dilakukan setiap hari, dipasarkan sebagai oleh-oleh, dan melalui agen distributor. Pemasaran mencakup wilayah DIY dan luar DIY seperti Jakarta,

Bandung, dan Bogor.

- Produk telah memiliki izin PIRT serta sertifikasi halal sebagai jaminan keamanan dan kehalalan bagi konsumen.
- Produk memiliki variasi gramasi: 85 gram untuk kemasan mie instan, 140 gram untuk kemasan mie telur, dan 35 gram untuk kemasan mie seduh. Tersedia juga mie telur varian fortifikasi dengan berbagai sayuran dan buah.

## **2. Monev Bantuan Alat PUPPL 2024, Provinsi Lampung, 26-28 Mei 2025**

Badan Pangan Nasional pada tahun 2024 melalui dana dekon pada Provinsi Lampung memberikan bantuan alat kepada dua UMKM yang masing-masing terletak di Kab. Lampung Timur dan Kab. Lampung Tengah. Pada UMKM Berkah Jamur di Kab. Lampung Timur, bantuan alat yang diberikan berupa oven, vacuum frying, mixer, vacuum sealer, freezer, genset, serta kipas exhaust dapat meningkatkan skala produksi, peningkatan ini juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan bahan baku yang digunakan untuk produksi, bantuan alat yang diberikan juga menambah komoditas yang diserap menjadi Jamur, Nanas, Pisang, Nangka, dan Singkong. Pada saat ini kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kapasitas produksi sehingga masih belum dapat memenuhi permintaan pasar.

Pada UMKM Griya Tiwul BUEKA di Lampung Timur, alat bantuan yang diberikan yaitu Vacuum sealer, Continuous sealer, Alat pengaduk adonan, Alat pencetak mie, Oven, Freezer, dan Deep Fryer. Inovasi produk yang sudah dikembangkan setelah menerima bantuan alat adalah Kue Babon yang berbahan baku campuran tepung mocaf dan tepung tapioka yang saat ini menjadi salah satu produk dengan permintaan tertinggi di pasaran terutama menjelang hari raya. Kapasitas produksi meningkat karena terjadi efisiensi waktu untuk pengolahan tiwul dengan penggunaan mesin. Semula, produksi tiwul membutuhkan waktu 30-40 hari untuk 3 ton ubi kayu. Setelah mendapat bantuan alat, waktu produksi dapat dipersingkat menjadi 20-25 hari. Kendala yang dihadapi saat ini: pelaku usaha sedang mengembangkan produk mie mocaf namun penggunaan campuran masih terlalu sedikit (sekitar 20%) dan sedang diupayakan untuk mencari formula terbaik agar tepung mocaf dapat lebih banyak digunakan pada campuran pembuatan mie.



#### **D. Menghadiri Undangan/Pertemuan**

##### **1. Pembahas pada inception workshop bertajuk “MyINDAH Project: Inclusive Digital Solutions for Healthy Diets yang diselenggarakan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 02 Mei 2025.**

Proyek MyINDAH merupakan proyek kolaborasi berbagai universitas dan lembaga penelitian, didukung oleh pendanaan dari Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia (KONEKSI). Tujuan workshop: mendapatkan masukan dan pandangan terkait rencana MyINDAH Project, dari berbagai stakeholder/institusi.

Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi Pangan diminta untuk memberikan pandangan dari sisi pemerintah pada rancangan proyek pengembangan profil gizi digital produk pertanian utama di wilayah perkotaan dan peri-urban Jawa yang akan dibuat. Profil gizi ini menggunakan data inframerah dan spektral, serta menyusun basis data sosio-ekonomi dan lingkungan yang terpilah gender untuk mengidentifikasi kekurangan gizi lokal.

Presentasi profil gizi disampaikan oleh Professor Yasmina Sultanbawa - Director of Centre for Nutrition and Food Sciences, The Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation (QAAFI), The University of Queensland dan Jimmy Berlianto, Center for Indonesia Policy Studies.

Beberapa poin yang disampaikan antara lain:

- Badan Pangan Nasional mendukung rencana pengembangan profil gizi yang akan dilakukan karena dapat berkontribusi pada program Indonesia Emas 2045, terutama dalam aspek kesehatan dan gizi, yang menjadi prioritas dalam RPJMN.
- Sejalan dengan strategi nasional pada Perpres 81/2024 terkait Pengarusutamaan

produksi dan konsumsi Pangan Lokal, proyek ini diharapkan dapat menggali potensi pangan lokal Indonesia, termasuk jenis pangan spesifik wilayah. Ke depan profil gizi diharapkan tidak tersentralisasi di Jawa tapi juga bisa di wilayah lain Indonesia yang memiliki banyak keragaman hayati.

- Saat ini Indonesia memiliki profil gizi yaitu Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) yang terakhir diupdate tahun 2017 dan dapat diakses <https://www.panganku.org>.
- Dengan adanya basis data sosio-ekonomi dan lingkungan yang terpilah gender, proyek ini dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi stunting, malnutrisi, dan akses terhadap pola makan yang seimbang.

## **2. Narasumber dan Peserta pada training workshop Leveraging Governance and Cross Institutional Coordination for Agrifood Systems Transformation in Indonesia, 5-7 Mei 2025**

Training Workshop: Leveraging Governance and Cross Institutional Coordination for Agrifood Systems Transformation in Indonesia dilaksanakan oleh FAO Indonesia bekerjasama dengan Kementerian PPN/Bappenas selama 3 hari, tanggal 05-07 Mei 2025 di Jakarta. Workshop bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan pada level nasional dan daerah tentang sistem pangan dan peran setiap pemangku kepentingan untuk mendukung agenda transformasi sistem pangan di Indonesia.

Workshop diawali sambutan dari FAO Representative For Indonesia dan Timor Leste, dilanjutkan sambutan dari Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas. Lokakarya dihadiri secara hybrid oleh 25 K/L dan Lembaga Mitra terkait. Narasumber pada hari-1 dari Bappenas, David Laborde (FAO) dan Prof. Ir. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc., Ph.D (Rektor Institute IPMI/ Anggota SAC FAO). Topik hari pertama terkait menerapkan pendekatan berbasis sistem dalam perencanaan dan implementasi pembangunan nasional serta memetakan kepentingan dan peluang, posisi kompromi, serta merancang solusi bersama dalam sistem pangan.

Topik hari kedua terkait how to use the potential of Agrifood system. Narasumber pada workshop hari kedua adalah fasilitator dari FAO, GAIN dan dihadiri oleh K/L terkait serta mitra Pembangunan. Bappenas bekerjasama dengan GAIN sedang membangun Dashboard Sistem Pangan Indonesia (DSPI) yang dapat diakses melalui

<https://dspi.bappenas.go.id/> yang mencakup 94 indikator meliputi 34 provinsi dan 514 kab/kota. DSPI dapat digunakan sebagai alat/platform untuk decision support system.

Topik hari ketiga terkait Localizing Agrifood Systems for tailored action and upscaled results. Narasumber pada hari ketiga adalah Badan Pangan Nasional (Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan) dan Asisten FAO Representative Program Indonesia. Selanjutnya dilakukan diskusi panel dan interaktif terkait implementasi transformasi sistem pangan di tingkat nasional dan daerah dengan narasumber dari perwakilan Kemenko Pangan, Bappeda Kota Semarang, Baperinda Manggarai Barat, Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PISAgr), Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati). Pertemuan dihadiri oleh K/L terkait, mitra Pembangunan, Perwakilan Bappeda dan OPD Pangan Provinsi dan Kabupaten/kota.

### **3. Narasumber dan Peserta pada Workshop Brainstorming Desa Berketahanan Pangan dan Iklim, 7-11 Mei 2025**

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan menjadi narasumber dalam Rapat Brainstorming Desa Berketahanan Pangan dan Iklim yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal pada 8 Mei 2025 di EL Hotel Jakarta Utara. Kegiatan Brainstorming ini dilakukan dalam rangka penyusunan Praktik Baik Desa Berketahanan Pangan dan Iklim pada Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD). Praktik baik ini akan disusun dalam bentuk Video Praktik baik yang nantinya akan dibagikan kepada 2000 kepala desa seluruh Indonesia untuk memberikan contoh bagaimana Desa Berketahanan Pangan dan Iklim.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dalam paparannya menjelaskan bahwa Desa Berketahanan Pangan harus memuat tiga aspek ketahanan pangan yaitu Ketersediaan, Akses dan Pemanfaatan Pangan. Rinna Syawal memberikan contoh program yang sudah dilaksanakan di Badan Pangan Nasional yaitu Program Desa B2SA.

Desa B2SA merupakan praktik baik ketahanan pangan berbasis partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, melainkan menjadi penggerak utama melalui kegiatan seperti teras pangan, gerai pangan, dan rumah pangan yang mendukung 3 aspek ketahanan pangan secara terpadu. Salah satu praktik nyata dalam program Desa B2SA adalah pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Pekarangan dapat menjadi sumber

pangan keluarga dengan menanam bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral guna mencukupi gizi harian.

Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Mengingat setiap desa di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang dapat diolah menjadi sumber pangan bergizi sesuai kebutuhan lokal. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Desa B2SA diharapkan dapat menjadi motor penggerak ketahanan pangan nasional. Melalui penguatan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan lokal, Indonesia dapat membangun desa yang mandiri, sehat, dan berkelanjutan.



#### 4. Mengikuti pengawasan bersama Keamanan Pangan dan B2SA di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bogor, 19 Mei 2025

Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Dit PKP) dan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor melaksanakan pengawasan bersama dan monitoring Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bogor pada hari Senin 19 Mei 2025. Monitoring dilaksanakan di SPPG Yayasan Perjuangan Untuk Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Tanah Sareal dan SPPG Yayasan Melati Sindang Rasa Kecamatan Bogor Timur. Hasil monitoring disampaikan sebagai berikut:

- SPPG Yayasan Perjuangan Untuk Kesejahteraan Rakyat melayani 3000 penerima manfaat MBG yang terdiri atas 7 TK, 2 SD/MI, 4 SMP/Mts, 2 SMA/ sederajat, dan 5 Posyandu. SPPG Yayasan Melati Sindang Rasa melayani 3552 penerima MBG, dengan dominasi siswa TK dan SD.
- Terkait penyusunan menu, masing-masing SPPG sudah memiliki ahli gizi, yang

bertugas menyusun menu sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Saat ini SPPG menyusun 20 paket menu untuk 1 bulan.

- Dari paket menu yang telah disusun oleh ahli gizi, utamanya makanan pokok yang digunakan adalah nasi. Belum menggunakan pangan sumber karbohidrat selain beras. Direktorat PKP mengingatkan stakeholder SPPG untuk menggunakan pangan lokal dalam penyusunan menu.
- Dit. PKP turut membagikan Buku Saku B2SA dan buku Keasi Menu B2SA untuk keperluan edukasi tim SPPG, selain itu Dit 3.1 juga membagikan satu set poster B2SA panel untuk mempromosikan pola konsumsi B2SA berbasis pangan lokal.
- Dit. PKP menginformasikan kepada ahli gizi di SPPG untuk mengingatkan tim guru di sekolah dan tim kader posyandu, dalam memanfaatkan waktu minimal 5 menit sebelum makan, untuk mengedukasi siswa dan masyarakat terkait makanan sehat dan bergizi. Sehingga siswa dan masyarakat bukan sebagai obyek dari program pemerintah melainkan bersama sama menyukseskan program yang baik ini.



## **5. Menghadiri Kick Off Pilot Project Perluasan Keterlibatan Peran UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis, 19 Mei 2025**

Kegiatan Kick Off Pilot Project: "Perluasan Keterlibatan Peran UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis" dilaksanakan pada Senin, 19 Mei 2025, di Pondok Pesantren Yayasan Al-Kasyaf yg juga merupakan SPPG di Kec Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat. Kegiatan dihadiri oleh Menteri UMKM, Wakil Menteri UMKM, Kepala Badan Gizi Nasional, Bupati Bandung, Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan, perwakilan Kementerian/Lembaga, perwakilan OPD Provinsi Jawa Barat, para mitra UMKM secara hybrid.

Menteri UMKM dalam sambutannya menyampaikan keterlibatan UMKM dalam mendukung kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai sektor, yaitu : (1) Di Hulu, UMKM berperan sebagai pemasok bahan baku, yaitu petani, nelayan dsbnya, (2) di bagian Midstream, UMKM berperam sebagai jasa boga di dapur SPPG, sedangkan di (3) Hilir, UMKM yang berperan adalah pengusaha pengolah limbah makanan. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian UMKM dan Badan Gizi Nasional. Harapannya melalui MoU ini dapat memperluas keterlibatan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Badan Pangan Nasional yang juga terus mendukung UMKM-UMKM khususnya pengolahan pangan lokal untuk dapat terus meningkatkan kapasitasnya menuju UMKM naik kelas.

Badan Pangan Nasional juga turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membagikan poster-poster terkait promosi dan edukasi konsumsi makanan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman di berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).



## **6. Menghadiri Pre-Event 1 #1 Nusantara Melon Fest dan Kunjungan ke Smartgreenhouse Pesantren Al-Mutazam, 28-29 Mei 2025**

Deputi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan didampingi Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan menghadiri Pre-Event 1 #1 Nusantara Melon Fest yang diselenggarakan oleh eQuaNik Agri Nusantara di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 28 Mei 2025. Festival yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2025 ini bertujuan sebagai ajang inovasi, kolaborasi dalam mewujudkan sistem pangan yang lebih kuat, berkelanjutan, serta mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara

luas. Kegiatan ini juga menjadi langkah nyata menegaskan peran daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Hadir pada Kegiatan tersebut Founder dan jajaran steering Comitte eQuaNik Agri Nusantara, Forkopimda Kab. Kuningan, Dinas terkait di Provinsi Jawa Barat dan Kab Kuningan serta petani melon. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada sambutannya menegaskan ke depan Bangsa Indonesia harus mencapai kemandirian pangan dimana semua kebutuhan pangan masyarakat berasal dari dalam negeri dan tidak ada impor lagi. Badan Pangan Nasional terus mendorong dan memprioritaskan pangan lokal sebagai pangan nasional.

Pada hari berikutnya, dilakukan kunjungan ke salah satu Smart Green House di Pesantren Al-Mutazam untuk penanaman Melon dan sayuran lainnya. Kunjungan ini sebagai bentuk apresiasi inovasi pertanian cerdas yang dikembangkan oleh pesantren kerjasama dengan E-Quanik Agri Nusantara, berfungsi sebagai teaching factory bagi santri serta perannya dalam mendukung kemandirian pangan, serta ekonomi lokal dan regenerasi petani muda. Bapanas berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif seperti ini, terutama dalam meningkatkan konsumsi sayur dan buah yang penting bagi asupan gizi dan kecerdasan.

### **III.2.2. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan**

Hasil pemantauan kegiatan prioritas Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan selama Bulan Mei 2025 sesuai dengan capaian realisasi keuangan sebagaimana Tabel 2. Kegiatan fisik yang mendukung pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **3.2.2.1 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan**

##### **1. Rapat Pembahasan Posisi Indonesia pada Forum EWG CCFICS**

Pertemuan Pembahasan Posisi Indonesia pada forum *Electronic Working Group (EWG) Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS)* secara online pada tanggal 2 Mei 2025 dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan dan dihadiri oleh pakar dari IPB Prof. Purwiyatno Hariyadi dan

perwakilan dari Barantin, BPOM, Kemenperin, BSN, Kementan, KKP, Kemenkes dan Asosiasi GAPMMI serta Badan Pangan Nasional.



Pada pertemuan ini dibahas dua agenda EWG, yaitu: (i). *Draft revision and updating of the Principles for Traceability/ Product Tracing as a Tool Within a Food Inspection and Certification System (CXG 60-2006) (step*

*2); dan (ii). Exchange of information between importing and exporting countries to support the trade in food (to develop guidelines on establishment listing) (new work)*

- *Draft revision and updating of the Principles for Traceability/ Product Tracing as a Tool Within a Food Inspection and Certification System* EWG ini diketuai US dan wakil ketua Australia, Ekuador, Honduras dan UK, untuk menyusun pedoman bagi otoritas kompeten agar dapat menerapkan ketertelusuran yang merupakan bagian dari sistem pengendalian pangan dan membantu pelaku usaha dalam menerapkan ketertelusuran pada operasional usaha di seluruh rantai pangan.
- Badan Karantina Indonesia sudah menerapkan *traceability* pada komoditi ekspor yang menjadi persyaratan negara tujuan, antara lain: Belanda, New Zeland dan Cina. *Traceability* untuk komoditi PSAT di dalam negeri, dilaksanakan melalui pendaftaran izin edar. Hingga saat ini belum ada regulasi yang dapat dijadikan acuan untuk membuat peraturan turunan terkait *traceability* pada PSAT. Sedangkan untuk pangan olahan, BPOM telah mempunyai pedoman *traceability and recall*.
- *Principles and Guidelines to Harmonise The Use, Development, and Implementation of Establishment Listings.*
- EWG ini diketuai Norwegia dan wakil ketua Australia, India, Maroko, Arab Saudi dan Spanyol, untuk menyusun pedoman dengan memfokuskan pembahasan pada sharing responsibility antara negara pengimpor dan negara pengekspor untuk mempertimbangkan, mengembangkan, menggunakan, menerapkan dan / atau memperbaharui persyaratan *establishment listing*

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kemendag akan menyusun posisi Indonesia dengan mempertimbangkan masukan-masukan hasil pertemuan dan mengirimkan masukan Indonesia melalui EWG platform.

## 2. Pembahasan Data Pengajuan Etilen Oksida dan 2-Kloroetanol pada CCCF

Rapat Pembahasan Data Pengajuan *Etilen Oksida* (EtO) dan *2-Kloroetanol* (2-CE) pada *Codex Committee on Contaminants in Food* (CCCF) yang diselenggarakan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan (SPO) BPOM selaku Koordinator MC CCCF secara daring pada tanggal 5 Mei 2025, dibuka oleh Plh. Direktur SPO BPOM dan dihadiri oleh pakar

Prof. Purwiyatno Hariyadi, Prof Sugiyono, dan perwakilan BSN, BPOM dan Bapanas.



Rapat ini bertujuan untuk membahas data yang dibutuhkan untuk mendukung tindak lanjut proposal EtO dan 2-CE yang telah masuk ke dalam *priority list of contaminants*

*for evaluation by JECFA*. Selain itu, rapat juga membahas posisi Indonesia pada beberapa *circular letter* (CL) yang telah mendekati *deadline*.

Dalam komunikasi dengan JECFA, diperoleh informasi bahwa diperlukan dukungan data yang dapat menjadi dasar JECFA untuk melakukan evaluasi pada EtO dan 2-CE sebagai kontaminan secara terpisah. Prof. Purwiyatno Hariyadi menyampaikan bahwa apabila Indonesia ingin menyampaikan *occurrence* data maka harus dipastikan bahwa data ini berasal dari cemaran bukan residu pestisida. Saat ini data yang dikumpulkan oleh Indonesia ataupun oleh Malaysia dan Thailand belum dapat dipastikan berasal dari cemaran. diperlukan *study literature* dari jurnal/report negara lain yang menginformasikan bahwa EtO dan 2-CE sebagai dua contaminant yang perlu dievaluasi secara terpisah.

Perwakilan Bapanas menyampaikan bahwa saat ini belum dapat mendukung data kajian EtO dan 2-CE karena adanya efisiensi anggaran. Namun akan memberikan masukan terkait dengan beberapa dokumen CL yang berkaitan dengan pangan segar. BPOM akan kembali melakukan studi literatur untuk memperkuat data dukung EtO dan 2-CE sebagai dua cemaran yang perlu dievaluasi secara terpisah dan melengkapi data yang dipersyaratkan oleh JECFA untuk ditinjau kembali bersama dengan pakar dan Bapanas menyampaikan posisi Indonesia pada beberapa CL yang terkait pangan segar. Posisi Indonesia yang dikirimkan Bapanas atas CL Sidang CCCF ke-18 melalui BPOM sebagai Koordinator MC CCCF yaitu *Request for comments on the application of maximum levels to multi-ingredient products (CL 2025/03-CF)* dan *Request for comments on the proposed maximum levels for lead in certain food categories: Spices (dried bark) and dried culinary herbs (CL 2025/09-CF)*, tanggal 9 Mei 2025 (Lampiran 3).

### 3. Mengikuti Sidang ACCSQ PFPWG ke-40

Sidang ASEAN *Consultative Committee for Standards and Quality-Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ-PFPWG)* ke-40 diikuti secara daring melalui video conference yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian pada tanggal 8-9 Mei 2025 di Kantor Kemenperin. Sidang dipimpin oleh *Chair* dari Myanmar dan *Vice-Chair* dari Philippines, dan diikuti oleh seluruh ASEAN *Member States (AMS)*, perwakilan ASEAN *Secretariat (ASEC)*, perwakilan dari Timor Leste sebagai observer serta perwakilan dari Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) dan EU juga turut hadir untuk membahas beberapa agenda khusus.



Agenda yang dibahas dalam siang yaitu tindak lanjut pertemuan PFPWG ke-39, *Implementation of MRA For Prepared Foodstuff (MRA on PF)*, ASEAN *Committee on Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards (ACHPFS)*, ASEAN *Food Testing Laboratory*

Committee (AFTLC), Asean Food Safety Regulatory Framework Agreement (AFSRF Agreement), Kerja Sama dengan PTB dan EU serta hal-hal lainnya.

Hasil sidang PFPWG ke-40 disusun oleh ASEC dan didarkan kepada PFPWG dalam waktu dua (2) minggu setelah sidang selesai. Sidang PFPWG ke-41 selanjutnya akan dilaksanakan secara fisik pada tanggal 17-21 November 2025 di Phuket, Thailand.

#### 4. Rapat Pembahasan CL pada Sidang CCCF ke-18



Dalam rangka menindaklanjuti permohonan masukan dari Sekretariat Codex terhadap beberapa *Circular Letter* (CL) pada Sidang *Codex Committee on Contaminants in Food* (CCCF) ke-18, Badan Pangan Nasional cq Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan selaku *Alternate Coordinator Mirror Committee* CCCF Indonesia telah melaksanakan rapat pembahasan penyusunan posisi Indonesia yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 13 Mei 2025.

Rapat diselenggarakan dengan mengundang pakar Dr. Diah Chandra Aryani, S.TP, M.Sc dari IPB University. Pembahasan dilakukan terhadap beberapa CL, yaitu:

- *CL 2025/10-CF: Request for comments at Step 3 on the proposed Code of practice for the prevention and reduction of cadmium contamination in foods ;*
- *CL 2025/13-CF: Request for comments on the revised Code of practice for the prevention and reduction of aflatoxin contamination in peanuts (CXC 55- 2004); dan*
- *CL 2025/15-CF: Request for comments on the revised numeric performance criteria for methods of analysis for total aflatoxins utilizing the sum of components concept in relevant sampling plans.*

Beberapa hasil pembahasan antara lain:

- Masukan untuk *Code of Practice* (CoP) Cadmium in Foods pada bagian ketentuan umum mitigasi kadmium dan lampiran khusus komoditas (beras dan rumput laut)

- Masukan untuk *Code of Practice (CoP) Aflatoxin in Peanut* pada bagian Ruang Lingkup, Definisi, *Good Agricultural Practices (GAP)*, *Good Manufacturing Practices (GMP)*, dan Manajemen Risiko sepanjang rantai pasok kacang tanah
- Indonesia mengusulkan penyesuaian nilai pada beberapa kriteria kinerja numerik utk metode analisis Aflatoxin Total pada komoditas pangan segar diantaranya *Peanut for further processing*, *Treenuts for further processing*, *RTE Treenuts* dan *Dried Figs*.

Masukan posisi Indonesia dari NFA akan dikirimkan ke BPOM selaku koordinator MC CCCF dan BSN selaku *Codex Contact Point* untuk kemudian disampaikan kepada Sekretariat Codex Alimentarius Commission dengan batas maksimal pengumpulan pada 15 dan 20 Mei 2025. Posisi Indonesia tersebut disajikan pada Lampiran 4.

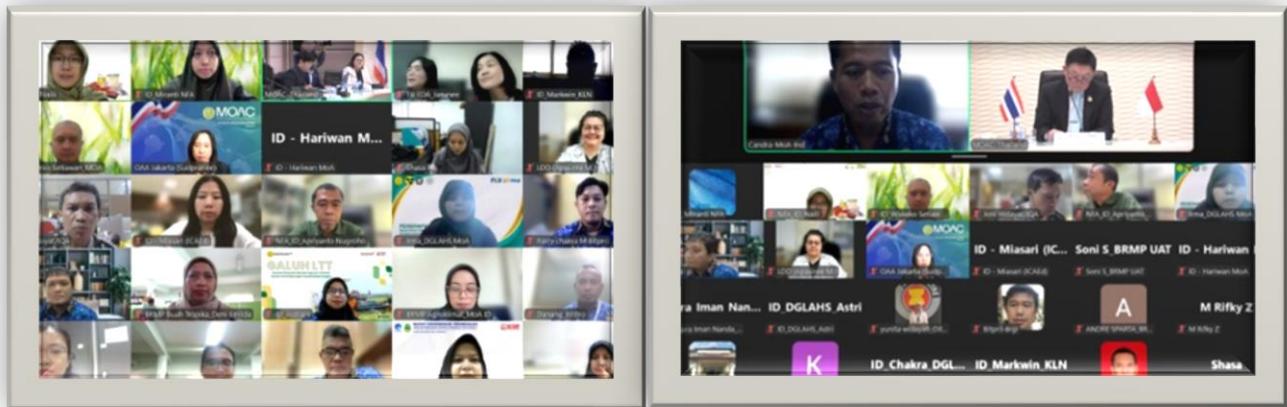
Masukan Indonesia pada CL ini akan dipublikasikan melalui website Codex sebagai dokumen kerja yang akan menjadi acuan dalam pembahasan pada sidang CCCF ke-18 di Bangkok, Thailand yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 - 27 Juni 2025 secara hybrid. NFA akan mengirimkan perwakilan Delri yang akan mengikuti sidang secara daring.

## **5. Mengikuti Pertemuan *The 9<sup>th</sup> Joint Agriculture Working Group (JAWG) Indonesia-Thailand***

Sehubungan dengan pelaksanaan *The 9<sup>th</sup> Joint Agricultural Working Group (JAWG) Indonesia – Thailand* secara daring pada tanggal 20 Mei 2025, Badan Pangan Nasional telah mengirimkan perwakilannya sebagai Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada pertemuan dimaksud. JAWG merupakan kerjasama bilateral di bidang pertanian antara Indonesia – Thailand yang diinisiasi sejak tahun 2006.

Pertemuan *The 9<sup>th</sup> JAWG* diketuai oleh Thailand (Dr. Tawon Thunjai, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, MOAC) dan Co-Chaired by Indonesia (Dr. Ade Candradijaya, Kepala Biro Kerja Sama Internasional Kementan). Pertemuan dihadiri perwakilan Delri (Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia) dan Delegasi Thailand (MOAC dan Ministry of Public Health (MOPH)). Delegasi Bapanas terdiri dari perwakilan Biro PKH, Dit PSKMP dan Dit PPSKMP.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama di sektor pertanian antara Indonesia - Thailand. Dalam pertemuan ini, kedua pihak bertukar informasi penting mengenai kebijakan dan regulasi pertanian masing-masing negara guna meningkatkan efektivitas kerja sama dan mengurangi hambatan perdagangan. Terdapat 9 agenda pembahasan, yaitu: pembukaan, adopsi agenda, pertukaran kebijakan, proposal proyek/kerjasama, update akses market, isu lainnya, tanggal dan lokasi JAWG selanjutnya, adopsi laporan serta penutupan.



Pada sesi pertukaran kebijakan (Agenda 3), Thailand membagikan 2 topik bahasan, yaitu: *Food Safety Regulations and Agricultural Standards in Thailand* dan *A Brief Procedure for Import of Live Animals and/or Animal Products into the Kingdom of Thailand*. Indonesia menyampaikan tentang *Agriculture Development Policy to Achieve Food Self Sufficiency*, *SPS Procedure*, dan *Import Procedures for Animals and Plants*.

Pada sesi pemaparan proposal program kerjasama (Agenda 4), pihak Thailand menawarkan beberapa kegiatan antara lain: *knowledge sharing* dan *capacity building* terkait penerapan GAP pada produksi beras, manajemen pertanian pada tanah masam, manajemen irigasi dan konferensi daring untuk mendukung system ketertelusuran yang efektif. Pihak Indonesia menawarkan program *capacity building* terkait data dan ketertelusuran produk karet untuk mendukung ekspor ke EU dan pasar global, serta kerjasama di sektor peternakan ruminansia.

Agenda 5 membahas akses pasar kedua belah pihak. Pihak Indonesia meng-update status terbaru beberapa komoditas ekspor dari Thailand yaitu jamur enoki, daun teh kering, dan ekspor hewan ternak dan produk turunannya. Thailand mengupdate status ekspor Indonesia untuk komoditas unggas dan kambing.

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan proposal program kerjasama akan dilakukan koordinasi lebih lanjut oleh masing-masing *contact point*. Pertemuan JAWG berikutnya akan dihosting oleh Indonesia secara fisik pada tahun 2026. Lokasi dan waktu kegiatan akan ditentukan lebih lanjut.

## **6. Mengikuti Rapat Pembahasan Usulan Pakar dalam Scientific Committee ARAC**

Dalam rangka memperkuat peran Indonesia dalam kerangka kerja sama regional ASEAN di bidang keamanan pangan, partisipasi aktif dalam ASEAN Risk Assessment Centre for Food Safety (ARAC) menjadi sangat strategis. Salah satu komponen penting dalam struktur ARAC adalah **Scientific Committee (SC)**, yaitu komite ilmiah yang berfungsi memberikan kajian teknis dan rekomendasi ilmiah atas isu-isu penilaian risiko pangan di kawasan.

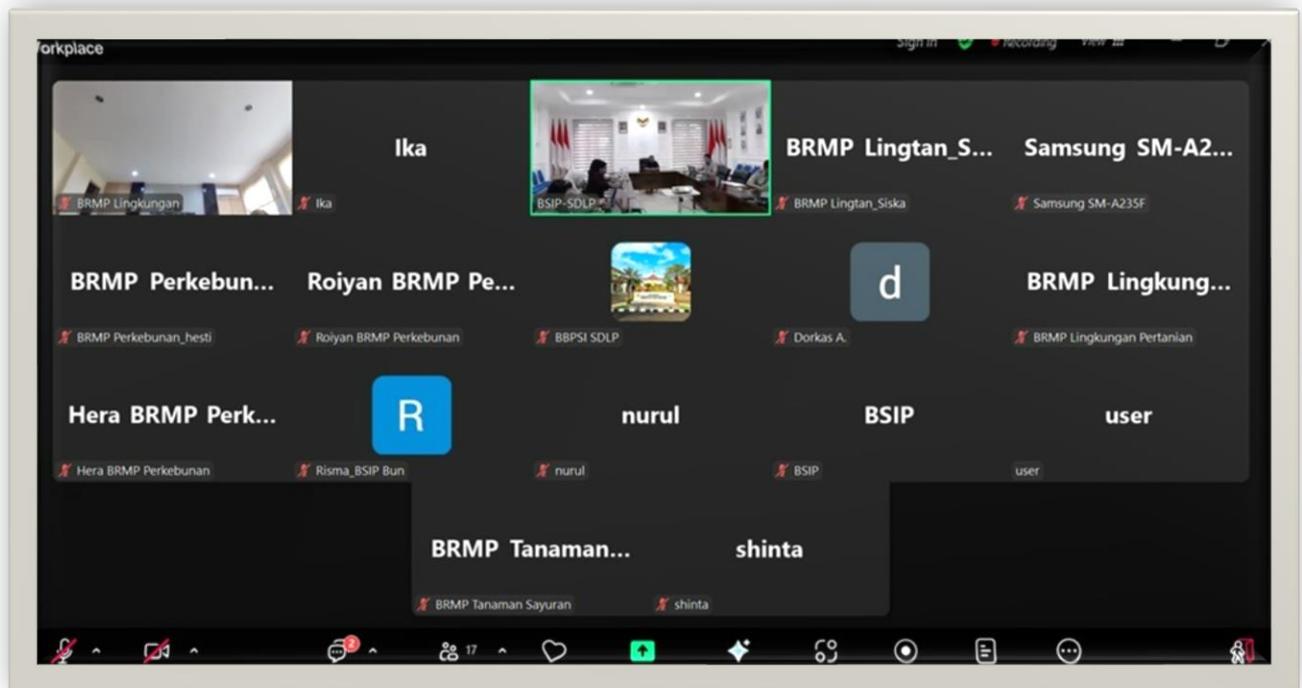
Sebagai bagian dari proses penguatan kontribusi Indonesia dalam SC ARAC, telah diselenggarakan **rapat pembahasan usulan nama pakar Indonesia** untuk menjadi anggota Scientific Committee tersebut yang diselenggarakan oleh BPOM secara daring pada tanggal 9 Mei 2025, dibuka oleh Ibu Endah dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, BPOM dan dihadiri oleh pakar Prof. S Joni Munarso dari Pusat Riset Agroindustri-BRIN dan perwakilan K/L diantaranya Kemenkes, Kemenlu, Kementan, Barantin, Bapanas, BRIN, dan BPOM. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memilih calon pakar yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta integritas ilmiah yang sesuai dengan kriteria keanggotaan SC ARAC.

Beberapa poin penting yang menjadi fokus rapat ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Fokus kajian ARAC saat ini adalah Arsenic and Cadmium in Rice among ASEAN Population dan Salmonella spp. in Cooked Chicken Dishes yang ditargetkan selesai pada Juni dan Oktober 2025.
- b. Perwakilan beberapa K/L menyampaikan beberapa masukan:
  - Nominasi pakar diharapkan berasal dari tim INARAC sebagai pusat penilaian risiko keamanan pangan nasional;

- Dukungan K/L terkait regulasi maupun data sangat penting dalam mendukung posisi SC ARAC;
- Potensi BRIN dalam dalam dukungan riset diharapkan dapat dimanfaatkan K/L dalam menyusun kajian risiko pangan.

Sebagai tindak lanjut dari rapat ini adalah sebagai berikut akan dibuatkan SOP/Juknis untuk internal Indonesia dalam membantu SC berkoordinasi di INARAC/Country Coordinator. Setiap K/L terkait dapat mengusulkan SC ARAC dgn mengisi nomination form scientific committee member ARAC selambat-lambat tgl 15 mei 2025 dan akan dilakukan pembahasan kembali sblm tgl 30 Mei untuk diajukan ke ARAC Secretariat. Anggota SC bisa diajukan dari jabatan struktural yg memiliki latar belakang/paham ttg issue yg dibahas.



## 7. Kajian Formaldehida pada Pangan Segar

Tujuan Kajian Formaldehida pada Pangan Segar adalah mengidentifikasi dan mengukur kandungan formaldehida yang terjadi secara alami dalam pangan segar, seperti buah dan sayur. Selain itu untuk memperoleh rekomendasi batas maksimal residu formaldehida pada pangan

segar.



Sampling pangan segar dilaksanakan pada tanggal 26-28 Mei 2025 dengan lokasi pengambilan di 4 Provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung dengan sasaran pengambilan sampel adalah importir, petani/gapoktan, pasar tradisional dan retail modern, yang dilanjutkan dengan preparasi sampel untuk diserahkan ke Laboratorium BPMB Kementerian Perdagangan di Ciracas – Jakarta Timur.

Adapun jenis pangan yang diambil sebagai sampel yakni anggur hijau, anggur merah, anggur hitam, pir hijau, pir kuning, pir madu (singo), kurma Sukkari, kurma Ajwa, pisang Sunpride kecil (pisang mas), pisang Cavendish besar (jenis ambon), pisang barangan, apel malang, apel Fuji, apel merah (*red apple*), tomat hijau, tomat merah sayur, kubis, wortel, kentang besar, kembang kol, jamur Shitake kering, jamur kuping kering dan jamur Enoki. Hasil pengujian ditabulasikan dan akan digunakan sebagai database dan rekomendasi.

## **8. Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Periode Mei 2025**

Direktorat Perumusan Standar Keamanan telah menerbitkan sebanyak 13 rekomendasi hasil kajian dan pembahasan sejak awal tahun 2025. Dan sepanjang Bulan Mei 2025, telah diterbitkan sebanyak 2 rekomendasi, yaitu terkait Izin Edar dan Parameter Uji Akar Teratai/Lotus Root serta tentang Pengujian Residu Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) pada Anggur.

Semua rekomendasi yang dihasilkan telah dimuat dalam website Badan Pangan Nasional dengan link berikut <https://badanpangan.go.id/tabelrhk>

### **3.2.2.2 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan**

## 1. Dukungan Terhadap Program Makan Bergizi Gratis-Badan Gizi Nasional

Badan Pangan Nasional turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan, optimalisasi SDM, dan pengelolaan pasokan pangan. Keamanan pangan segar dan peningkatan penganekaragaman pangan merupakan hal yang penting dan perlu dipastikan dalam operasional harian MBG. Penyiapan SDM di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memahami mutu dan keamanan pangan adalah upaya penting yang perlu dilakukan. Beberapa bentuk dukungan Bapanas melalui Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan antara lain sebagai berikut:

### a. Mengikuti Rapat Finalisasi Draft Pedoman Sertifikasi HACCP pada SPPG dan Penjajakan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko Program Pemenuhan Gizi

Rapat Finalisasi Draft Pedoman Sertifikasi HACPP pada SPPG dan Penjajakan Kerjasama dalam Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko Program Pemenuhan Gizi Nasional yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional (BGN) pada tanggal 2 Mei 2025 di



Hotel Aston Simatupang, dibuka oleh Plt. Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi, dengan narasumber dari Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi BSN serta pihak ketiga

Levner Consultant, dihadiri perwakilan dari Kemenkes, BPOM, dan BAPANAS.

Rapat bertujuan untuk menjaring masukan mengenai draft Pedoman Sertifikasi HACCP pada SPPG yang komprehensif dan aplikatif. Pedoman ini ditujukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi ke fasilitas SPPG. Dari rapat sebelumnya telah diberikan beberapa masukan yang diakomodir pada draft yg dapat diakses melalui

<https://1drv.ms/w/c/e8d30297b8fd2fa0/EfAT2CoFbqVlqUEglmeFn4BNfjFvqhfUuMR1z3GvE8SNg>

Beberapa poin diskusi mengenai draft Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan pada SPPG, antara lain:

- Judul Pedoman dan Sertifikasi akan diubah menjadi lebih general untuk menghindari *misleading* terhadap sertifikasi tertentu.
- Sertifikasi keamanan pangan SPPG dilaksanakan melalui dua tahapan berjenjang, dimana tahap pertama adalah Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai dasar pemenuhan aspek kebersihan dan sanitasi lingkungan produksi pangan. Jika SPPG telah memiliki SLHS, maka dapat mengajukan permohonan sertifikasi HACCP.
- Terkait hal tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian pada beberapa klausul di checklist sertifikasi SHLS dan HACCP yang beririsan untuk mencegah overlapping.
- Akan diberlakukan sistem grading berdasarkan hasil audit dari tiap SPPG dengan baseline menyesuaikan dengan sistem yg telah ada dari Kemenkes. Hasil grading tsb berimplikasi terhadap pola Kerjasama dengan mitra.
- Selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan kembali draft Pedoman Sertifikasi oleh BGN dengan target Pengesahan Naskah Peraturan Kepala BGN terkait Skema Sertifikasi Keamanan Pangan SPPG.

**b. Mengikuti Pertemuan Pemantapan ToT dan Koordinasi Diklat SPPI Batch-3 secara Hybrid**

Menindaklanjuti komitmen NFA bersama dengan dinas urusan pangan dalam mendukung program MBG melalui pengayaan kompetensi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan (SPPI) Batch-3 tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan Penguatan ToT dan Koordinasi Pelatihan SPPI dimaksud pada tanggal 6 Mei 2025 secara daring. Pertemuan dibuka oleh Deputi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan dihadiri oleh Direktur PKP, Direktur PSKMP, Direktur PPSKMP, serta calon tenaga pengajar yang berasal dari 17 provinsi dan internal lingkup Kedeputian 3

Pertemuan ini dimaksudkan untuk menguatkan kembali pemahaman calon tenaga pengajar setelah kegiatan ToT di Unhan Sentul pada tanggal 25 Februari lalu, serta berkoordinasi terkait persiapan pelaksanaan pelatihan SPPI di tiap provinsi yang akan dimulai sekitar bulan Juni-Juli 2025.

Materi/bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta diklat SPPI adalah yang terkait tentang penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi dan sumber daya



lokal, penjaminan keamanan pangan, serta upaya penyelamatan pangan dengan alokasi 4 JP.

Peserta ToT memiliki kewajiban untuk melakukan diseminasi materi kepada tenaga pengajar lainnya di masing-masing provinsi yang akan terlibat sebagai tenaga pengajar Diklat SPPI Batch-3.

Pada pertemuan ini disampaikan penguatan materi/bahan ajar oleh pemateri dari perwakilan Dit PKP, Dit PSKMP dan Dit PPSKMP mengenai:

- Cara Pemilihan, Penanganan, dan

Penyimpanan Pangan Segar yang Aman dan Bermutu;

- Cara Menentukan Pemasok Pangan Segar;
- Persyaratan Gudang Pangan Segar;
- Pola Konsumsi Pangan B2SA berbasis pemanfaatan sumber daya lokal; dan
- Praktek Uji Cepat Residu Pestisida dan Formalin.

Dalam pertemuan ini, setiap perwakilan dari 17 provinsi melaporkan progres persiapan pelatihan SPPI hasil koordinasi dengan koordinator manajerial diklat masing-masing

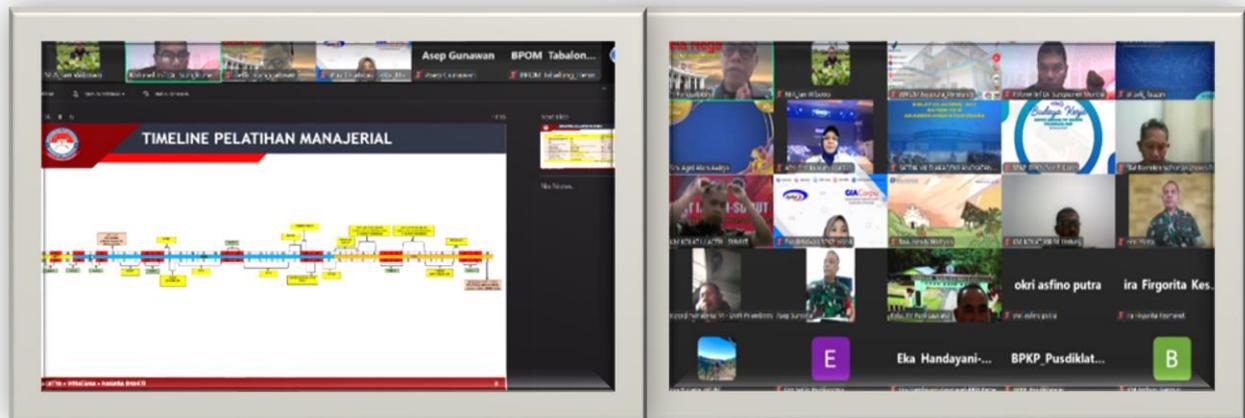
Selanjutnya Tim koordinasi NFA akan mengidentifikasi ketersediaan tenaga pengajar tiap provinsi dan memastikan bahwa penyampaian ilmu (diseminasi) kepada calon seluruh tenaga pengajar terlaksana sebelum Diklat Manajerial SPPI Batch-3 yang dilaksanakan pada 14 Juni-14 Juli 2025. NFA akan mengirimkan bantuan tenaga pengajar pada beberapa titik diklat di daerah yang kekurangan tenaga pengajar.

### **c. Mengikuti Rakor Kesiapan Operasional Diklat SPPI Batch-3 dari Universitas Pertahanan**

Rapat koordinasi persiapan operasional pelaksanaan pelatihan manajerial SPPI Batch-3 secara daring pada tanggal 22 Mei 2025, dipimpin oleh Kol. Jeffri Panggabean selaku Koordinator Manajerial (KM) Posko Pusat SPPI Batch-3, dihadiri oleh Komandan

Kolat seluruh Indonesia (15 Kolat) dan perwakilan instansi yang terlibat dalam pelatihan manajerial.

Rapat dimaksudkan untuk menyampaikan update kesiapan pelaksanaan pelatihan manajerial di semua satuan pendidikan (satdik) pada 15 Kolat. Dalam pertemuan ini disampaikan update per tanggal 22 Mei 2025 untuk tiap satdik terkait jumlah siswa dan jumlah kelas yang disiapkan beserta jenis kelasnya (kelas kecil 30-50 orang, kelas sedang maks 180 org, kelas besar untuk siswa di atas 200 org). Untuk jadwal fix tiap satdik belum disampaikan.



Pelatihan manajerial akan dimulai pada tanggal 24 Mei yang diawali materi dari internal Unhan, materi dari instansi luar akan dimulai pada tanggal 12 Juni, dan penutupan Diklat SPPI pada tanggal 14 Juli 2025. Jadwal materi Bapanas (4 JP, 1 JP = 50 menit) diplot posko pusat Unhan tanggal 11 Juli, tapi riil di lapangan dilaksanakan sesuai kesiapan Kolat setempat yang dikoordinasikan dengan instansi masing-masing.

Disampaikan bahwa Unhan menyiapkan honor (200rb/JP dipotong pajak) dan transport lokal untuk tiap tenaga pengajar (TP) dengan ketentuan: 1 kelas kecil maksimal 1 TP, 1 kelas sedang maksimal 3 TP, 1 kelas besar: siswa 200-300 maks TP 3 org, siswa 350-400 maks TP 8 org, siswa 450-500 maks TP 10 orang . Beberapa instansi menyampaikan keterbatasan TP di wilayah satdik sehingga perlu mendatangkan TP dari luar daerah dan mempertanyakan terkait biaya transportnya. Untuk hal ini, Unhan menyampaikan sesuai ketentuan dari BGN mereka tidak bisa menanggung transport luar kota, tapi akan berupaya menyampaikan kembali permasalahan tersebut ke BGN.

Sebagai tindak lanjut, diharapkan tiap instansi semakin intensif untuk menyiapkan tenaga pengajar dan berkoordinasi dengan KM masing-masing. Posko Pusat Unhan akan

mengupayakan data final pelaksanaan pelatihan manajerial dimaksud paling lambat 31 Mei 2025.

## **2. Mendampingi Deputi pada Kunjungan dan Koordinasi dengan OKKPD Provinsi Jawa Tengah**

Dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan dan kinerja terkait keamanan dan mutu pangan, Deputi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan beserta perwakilan Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan melakukan kunjungan ke provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Mei 2025. Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dr. Andriko Noto Susanto, memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam



penguatan keamanan pangan daerah.

Selama periode 2023–2025, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui OKKPD telah mencatatkan capaian signifikan, yakni: 56 penerbitan SPPB-PSAT, 142 PSAT-PD, 3 izin rumah pengemasan, 74 health certificate, 4 sertifikasi Prima, dan 6 sertifikasi organik. Selain itu, berdasarkan hasil penilaian di tahun 2023, OKKPD Jawa Tengah telah melakukan koordinasi dengan K/L atau satgas lain melalui Jaringan Keamanan Pangan Daerah (JKPD), melaksanakan kegiatan sosialisasi, KIE melalui media radio secara regular, melakukan audit internal, membuka layanan pengujian dan mempunyai laboratorium sendiri yang telah terakreditasi KAN, telah dilakukan pengendalian internal secara regular dan perbaikan secara berkelanjutan.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) melalui pengawasan yang berbasis risiko serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas pangan. OKKPD Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keamanan pangan demi masyarakat yang lebih sehat. Kolaborasi yang erat antara pusat dan daerah adalah kunci untuk memastikan pangan yang aman, sehat, dan bermutu sampai ke tangan masyarakat..

### **3. Mengikuti Pelatihan BTSF-EU *Food Safety Crisis Preparedness* di Seoul, Korea**

Dalam rangka memperkuat sistem manajemen pengawasan keamanan pangan menghadapi kejadian foodborne illness akibat globalisasi produksi dan perdagangan pangan antar negara, Badan Pangan Nasional telah mengikuti training dengan tema *Food Safety Crisis Preparedness* yang diselenggarakan oleh *Better Training for Safer Food* (BTSF). BTSF merupakan program kegiatan yang dibiayai *European Union* (EU) untuk mengorganisir serangkaian pelatihan terkait keamanan pangan, kesehatan tanaman serta



kesehatan dan kesejahteraan hewan.

*Workshop on Food Safety Crisis Preparedness* bertujuan : (i) memberikan pelatihan khusus dalam kerangka INFOSAN sebagai bagian dari kerjasama global di bidang kesiapsiagaan dan manajemen krisis keamanan pangan; (ii). Meningkatkan kolaborasi antara pejabat dari negara anggota EU – Non EU melalui INFOSAN; (iii). Memperkuat

jaringan diantara pengelola krisis keamanan pangan dari negara anggota EU - Non EU; (iv). Memfasilitasi pertukaran pengalaman dan penyebarluasan praktik terbaik terkait prosedur manajemen krisis keamanan pangan di institusi Uni Eropa dan negara non-Uni Eropa.

Training yang dilaksanakan di Seoul - Korea Selatan pada tanggal 12-16 Mei 2025 diikuti oleh perwakilan dari beberapa negara di eropa dan negara diluar eropa. Perwakilan Indonesia antara lain Badan Pangan Nasional selaku otoritas kompeten keamanan pangan segar dan BPOM selaku otoritas kompeten keamanan pangan olahan.

Training ini menekankan pentingnya memperkuat sistem koordinasi penanganan kasus keamanan pangan secara internasional melalui plattform yang dibangun oleh FAO/WHO, yaitu International Food Safety Authorities Network (INFOSAN). INFOSAN merupakan platform kerjasama global yang melibatkan otoritas keamanan pangan dari berbagai negara, termasuk UE. Indonesia merupakan salah satu anggota INFOSAN bersama 190 negara lainnya.

Sebagai tindaklanjut hasil training, diharapkan masing-masing negara melakukan diseminasi kepada otoritas kompeten keamanan pangan di masing-masing negara. Badan Pangan Nasional dan Badan POM selaku perwakilan dari Indonesia dalam training tersebut merencanakan akan menyelenggarakan kegiatan diseminasi dengan melibatkan otoritas kompeten keamanan pangan dari lintas Kementerian/ Lembaga, OKKPD, pelaku usaha, dan laboratorium.

#### **4. Mengikuti Indonesia *Agricultural Biotechnology Showcase* oleh Kedubes US**

Pertemuan Indonesia *Agricultural Biotechnology Showcase* yang dilaksanakan oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2025 di @america, Pacific Place Mall Jakarta, dibuka oleh *Deputy Chief of Mission* (Ms. Heather C. Merritt) dan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Komisi Keamanan Hayati (Bambang Prasetya). Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain: perwakilan K/L terkait (KHH, Kementan, Kemen LH, Bapanas, BGN, BPJPH, BPOM, BRIN, Kemenko Ekon, Kemendag dan Kemenhan), Stakeholder (Croplife, perusahaan bioteknologi, dan U.S. Soybean

Export Council), Organisasi Profesi (Future Farmers of Indonesia dan Gakoptindo), dan akademisi (Prof Ahmad Sulaeman, mahasiswa dari IPB University dan Sahid University).



Pertemuan Indonesia *Agricultural Biotechnology Showcase* bertujuan untuk memperkenalkan rekam jejak Indonesia dalam inovasi bioteknologi pertanian serta menggali bagaimana produk bioteknologi yang dapat memperkuat ketahanan pangan dan nutrisi nasional. Pertemuan ini diisi dengan rangkaian: metode presentasi interaktif, diskusi panel, demonstrasi memasak produk bioteknologi, dan

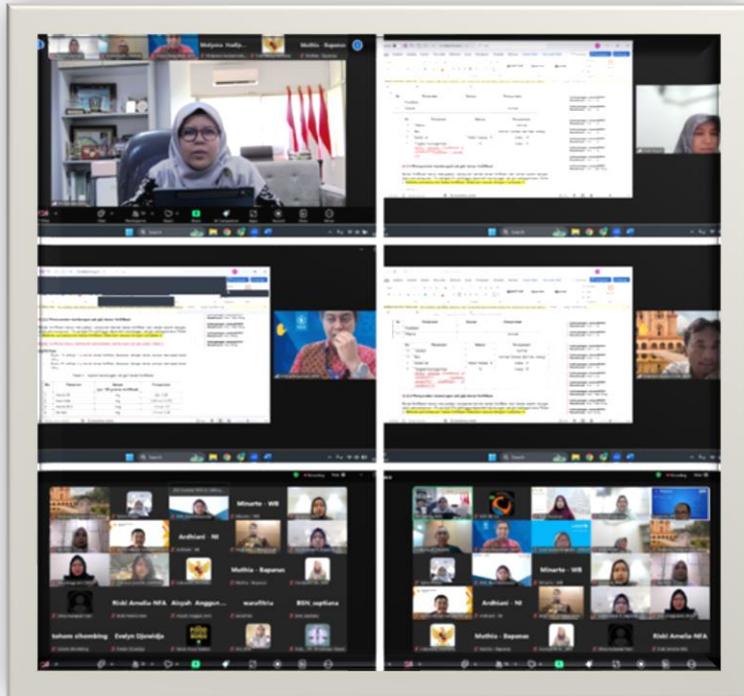
pameran produk bioteknologi.

Pertemuan ini menekankan pada potensi bioteknologi dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia dan pentingnya dukungan regulasi bagi pengembang/peneliti dan petani. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan penyederhanaan regulasi serta peningkatan pendanaan riset untuk mengakselerasi pengembangan produk bioteknologi yang bermanfaat bagi sektor pertanian.

### **3.2.2.3 Penyusunan Standar Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan.**

#### **1. Rapat Teknis 2 SRNI Beras Fortifikasi**

Sehubungan dengan penyusunan RSNI Beras Fortifikasi oleh Komite Teknis 67:11 Pangan Segar Tertentu, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan selaku ketua dan sekretariat Komtek 67:11 telah melaksanakan Rapat Teknis 2 RSNI Beras Fortifikasi secara hybrid pada 2 Mei 2025.



Rapat teknis ini membahas RSNi2 sebagai tindak lanjut Ratek 1 yang dilaksanakan pada 21 April 2025, dengan hasil antara lain:

- telah disepakati parameter mutu beras fortifikasi antara lain sensori (warna, tekstur, dan bau), kadar air, serta tingkat homogenitas yang diukur sebagai nilai CV.
- pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan zat gizi dan tingkat homogenitas pencampuran.

- Rasio pencampuran antara kernel beras fortifikan terhadap beras sosoh sekurang-kurangnya 1%. Hal ini akan dilihat kembali dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha.
- tidak perlu anjuran “tidak dicuci” mengingat beras fortifikasi diperoleh dari pencampuran dengan kernel yang diproduksi dengan metode ekstruksi. Pencucian beras akan berdampak pada beras fortifikasi yang diproduksi dengan metode dusting.
- perlu ditambahkan desain contoh layout labelling.
- beberapa perbaikan redaksioanal.

Tindak lanjut dari rapat ini diantaranya adalah Sekretariat komtek akan menyusun draft RSNi3 sebagai hasil Ratek 2 sesuai dengan masukan dari anggota komtek. Penyusunan masuk pada tahap selanjutnya yaitu konsensus, yang akan dilaksanakan pada minggu ke-3 Mei 2025. Kemudian akan dilanjutkan dengan jajak pendapat dan proses penetapan.

### **3. Mengikuti Rapat Klarifikasi RPP Perubahan PP 86 Tahun 2019**

Rapat Klarifikasi RPP Perubahan PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, tanggal 19 Mei 2025, dilaksanakan secara daring. Rapat dipimpin oleh Asdep Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Badan Pangan

Nasional, dan BPOM . Perwakilan Badan Pangan Nasional dipimpin Bapak Plt. Sekretaris Utama, didampingi Kepala Biro OSH dan Direktur 32 PSKMP beserta Tim.



Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Bapak Presiden, tanggal 27 Maret 2025 hal permohonan penetapan RPP perubahan atas PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, sehingga perlu dilakukan klarifikasi akhir atas rumusan pasal-pasal perubahan yang diatur dalam RPP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, sebelum ditetapkan Presiden.

Hasil dari pertemuan ini antara lain:

- a. Telah disepakati beberapa pending issues yaitu: ketentuan Pasal 47 ayat (2a), Pasal 47 ayat (2b), Pasal 47 ayat (2c), Pasal 40, Pasal 50, dan Pasal 75 ayat (6);
- b. Klarifikasi dan disepakati perubahan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 75 ayat (6) semula mengatur peran/kewenangan Kemenko bidang PMK diubah menjadi Kemenko Bidang Pangan;
- c. Badan Pangan Nasional mengusulkan menambahkan kewenangan Badan Pangan Nasional dalam tata cara persetujuan impor yang diatur dalam Pasal 44 ayat (5), karena Badan Pangan Nasional menerbitkan rumah kemas (*packing house*) untuk pangan segar atas tumbuhan yang beredar;
- d. Pasal 40 mengatur mengenai pengujian laboratorium tidak jadi dihapus keseluruhan namun dilakukan perbaikan rumusan menjadi pengujian laboratorium dalam rangka pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;

- e. Beberapa pasal dilakukan perbaikan yang sifatnya redaksional dan penyempurnaan legal drafting;

Rencana Tindak Lanjut dari rapat ini yakni:

- Kementerian Sekretariat Negara akan memperbaiki rumusan RPP 86 Tahun 2019 sesuai hasil rapat klarifikasi dan akan menyampaikan permohonan paraf kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait,
- Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional akan memberikan paraf ulang pada halaman/lembar rumusan pasal perubahan pending issue yang telah disepakati saja; dan
- Menko bidang Pangan dan BPOM memberikan paraf pada seluruh halaman naskah RPP 86 Tahun 2019.

#### **4. Rapat Konsensus Penyusunan RSNI Beras Fortifikasi**

an Rapat Konsensus Penyusunan RSNI Beras Fortifikasi diawali dengan sambutan oleh *Representative and Country Director* WFP-Indonesia yang menyatakan bahwa beras fortifikasi menjadi salah satu untuk program MBG. Selanjutnya Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam arahnya menyatakan bahwa beras fortifikasi di dalam ketahanan pangan masuk ke dalam Undang-undang Pangan, dan pemanfaatan beras fortifikasi sudah masuk ke dalam RPJMN tahun 2025-2029 dimana fortifikasi adalah langkah cerdas untuk meningkatkan gizi secara mandiri.



Diharapkan standar ini sudah dapat ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional pada

awal Juli 2025 dan segera dapat diimplementasikan untuk beras dengan tujuan komersil, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan bantuan pangan pemerintah.

Rapat Konsensus Penyusunan RSNi Beras Fortifikasi merupakan tahap pembahasan terakhir sebelum jajak pendapat. Beberapa poin hasil rapat adalah sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup mencakup persyaratan beras yang akan difortifikasi yaitu persyaratan keamanan, persyaratan mutu (persyaratan mutu beras fortifikasi dan persyaratan kandungan zat gizi beras fortifikasi), cara produksi pangan yang baik, pengemasan dan penyimpanan, pelabelan, pengambilan contoh dan metode uji.
- b. Pada pertemuan ini juga disampaikan bahwa perlu melakukan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan penanganan beras fortifikasi, serta sosialisasi kepada pengawas dan satgas pangan terkait standar beras fortifikasi dan mekanisme pengawasan beras fortifikasi di peredaran.

## **5. Pelaksanaan Jajak Pendapat Komite Teknis 67-11 Pangan Segar Tertentu tentang Rancangan SNI Beras Fortifikasi**

Setelah dilaksanakannya Rapat Konsensus Penyusunan RSNi Beras Fortifikasi secara hybrid tanggal 21 Mei 2025 ditindaklanjuti dengan melakukan jajak pendapat yang dilakukan oleh BSN. Untuk itu BSN telah memuat informasi tentang penyusunan RSNi tersebut di laman BSN dengan alamat <https://bsn.go.id/main/berita/detail/25132/informasi-pelaksanaan-jajak-pendapat-komite-teknis-67-11-pangan-segar-tertentu> pada tanggal 28 Mei 2025 untuk mendapatkan masukan dari masyarakat umum. Jajak pendapat RSNi yang menetapkan persyaratan beras fortifikasi ini berlangsung mulai tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan 28 Juni 2025, dimana tanggapan dapat disampaikan melalui email: [Komtek\\_AKKPK@bsn.go.id](mailto:Komtek_AKKPK@bsn.go.id)

Selain dimuat di laman BSN, Badan Pangan Nasional turut menyebarluarkan informasi jajak pendapat ini di akun instagram Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi Keamanan dan Mutu Pangan-Badan Pangan Nasional dengan alamat di link berikut <https://www.instagram.com/p/DKY6H7cPyXT/?igsh=OXhrbTk1NnJsbzI0>



### 3.2.2.4 Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina

#### 1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian OKKPD Kabupaten/Kota dan Realisasi Dana Dekonsentrasi 2025

Sebagai bagian dari upaya pembinaan, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan melakukan penilaian terhadap penerapan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar di OKKPD Provinsi maupun OKKPD Kabupaten/Kota. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa OKKPD memenuhi standar minimal yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Hasil penilaian ini juga menjadi dasar dalam pemberian penghargaan kepada daerah yang berhasil menerapkan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar secara efektif.

Terbitnya revisi anggaran DIPA ke-2 Tahun 2025 menyebabkan adanya penyesuaian untuk kegiatan dekonsentrasi. Penyesuaian anggaran untuk bahan promosi yang semula sebesar Rp.20.000.000 menjadi Rp.15.000.000, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam rangka koordinasi yang semula sebesar Rp. 30.000.000 menjadi Rp.15.000.000,-.Terkait anggaran yang dibintang, tidak semua tidak dapat digunakan, namun ada sejumlah nominal yang dapat digunakan. Dalam forum ini Direktorat PSKMP

dan Dinas Urusan Pangan Provinsi dapat menyamakan persepsi tentang anggaran yang dapat digunakan. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk kegiatan perjalanan dalam rangka koordinasi dan pengadaan bahan promosi keamanan dan mutu pangan.

Seluruh provinsi berkomitmen untuk tetap melaksanakan penilaian OKKPD Kab/Kota baik secara luring maupun daring dan pencetakan KIE sesuai dengan target yang telah ditetapkan (sesuai juknis). Dan diharapkan proses penilaian OKKPD Kab/Kota pada 27 Provinsi akan selesai sebelum 31 Juli 2025 untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi hasil penilaian oleh Badan Pangan Nasional. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan akan melakukan verifikasi hasil penilaian OKKPD



Kabupaten/Kota pada 27 Provinsi pada bulan Juli - September 2025.

## **2. Melaksanakan Sidang Hasil Penilaian Pemenuhan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Daerah OKKPD Provinsi**

Dalam upaya memperkuat sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar di daerah, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan kembali melanjutkan penilaian terhadap Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) terhadap 7 provinsi pada tahun 2025. Tujuh provinsi tersebut adalah Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Papua Barat.

Kegiatan penilaian ini mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun



2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan. Penilaian ini merupakan bagian dari pembinaan kepada OKKPD dalam menerapkan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar yang beredar.

Hasil penilaian 7 OKKPD dimaksud, telah disidangkan pada tanggal 23 Mei 2025 untuk menetapkan kriteria yang sesuai berdasarkan nilai yang diperoleh masing-masing provinsi. Kriteria tersebut diantaranya adalah Sangat Baik, Baik dan Cukup. Untuk provinsi yang mendapatkan nilai dengan kriteria kurang, akan dilakukan pembinaan lebih lanjut oleh Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan. Sebagai bentuk apresiasi kepada OKKPD yang telah dinilai dan berhasil memenuhi kriteria, Badan Pangan Nasional akan memberikan sertifikat penilaian pada waktu dan kesempatan yang akan ditentukan kemudian.

### **3. Perkembangan Realisasi Kegiatan Dekonsentrasi 2025**

Dalam rangka penguatan sistem manajemen pengawasan keamanan dan mutu pangan ini, mulai tahun 2024 Badan Pangan Nasional telah melaksanakan kegiatan melalui dana dekonsentrasi dalam kegiatan koordinasi, kerjasama, advokasi, sosialisasi, dan KIE di bidang standar keamanan dan mutu pangan daerah. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan untuk penguatan kelembagaan keamanan pangan daerah, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat termasuk pelaku usaha pangan tentang keamanan pangan. Pelaksana kegiatan ini adalah unit yang menangani keamanan pangan segar pada dinas yang menangani urusan pangan atau ketahanan pangan provinsi (baik UPT maupun

bidang disesuaikan dengan kondisi masing-masing) di 27 provinsi yang telah dilakukan penilaian kelembagaan keamanan pangan hingga tahun 2024, yaitu:

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Riau
4. Provinsi Kepulauan Riau
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Sumatera Barat
7. Provinsi Sumatera Selatan
8. Provinsi Bengkulu
9. Provinsi Lampung
10. Provinsi DKI Jakarta
11. Provinsi Jawa Barat
12. Provinsi Banten
13. Provinsi Jawa Tengah
14. Provinsi DI Yogyakarta
15. Provinsi Jawa Timur
16. Provinsi Bali
17. Provinsi Nusa Tenggara Timur
18. Provinsi Kalimantan Tengah
19. Provinsi Kalimantan Timur
20. Provinsi Kalimantan Utara
21. Provinsi Sulawesi Utara
22. Provinsi Gorontalo
23. Provinsi Sulawesi Barat
24. Provinsi Sulawesi Tengah
25. Provinsi Sulawesi Selatan
26. Provinsi Maluku
27. Provinsi Maluku Utara

Kegiatan fasilitasi dan pembinaan otoritas kompeten keamanan pangan daerah dilakukan melalui pengadaan bahan promosi keamanan pangan; penilaian dan/atau surveilan kelembagaan OKKPD Kabupaten/Kota serta koordinasi. Dengan adanya efisiensi alokasi anggaran Kementerian/Lembaga berdasarkan arahan dari Kementerian Keuangan, maka dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dalam hal komponen kegiatan dan jumlah anggaran. Pada Bulan Mei 2025 realisasi penggunaan anggaran dekonsentrasi secara terperinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Realisasi Kegiatan Dekonsentrasi Daerah Tahun 2025  
Periode Sampai dengan 31 Mei 2025**

| No | Provinsi            | Alokasi Hasil Revisi |            |                 | Realisasi Anggaran |           |                    |           | Sisa Anggaran      |           |
|----|---------------------|----------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
|    |                     | Anggaran             | Volume     |                 | SP2D               |           | Akrual             |           | Rp                 | %         |
|    |                     |                      |            |                 | Rp                 | %         | Rp                 | %         |                    |           |
| 1  | Jawa Barat          | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | 4.256.000          | 14        | 4.256.000          | 14        | 25.744.000         | 86        |
| 2  | Jawa Tengah         | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 30.000.000         | 100       |
| 3  | Jawa Timur          | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 30.000.000         | 100       |
| 4  | Lampung             | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | 7.500.000          | 25        | 7.500.000          | 25        | 22.500.000         | 75        |
| 5  | Sumatera Selatan    | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 30.000.000         | 100       |
| 6  | Jambi               | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 30.000.000         | 100       |
| 7  | Bengkulu            | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 30.000.000         | 100       |
| 8  | Sumatera Barat      | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 30.000.000         | 100       |
| 9  | Bali                | 27.000.000           | 4          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 27.000.000         | 100       |
| 10 | Maluku              | 40.000.000           | 5          | kab/kota        | 25.000.000         | 63        | 25.000.000         | 63        | 15.000.000         | 38        |
| 11 | Maluku Utara        | 40.000.000           | 5          | kab/kota        | 25.000.000         | 63        | 25.000.000         | 63        | 15.000.000         | 38        |
| 12 | Banten              | 21.000.000           | 3          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 21.000.000         | 100       |
| 13 | Sulawesi Barat      | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 30.000.000         | 100       |
| 14 | Kalimantan Tengah   | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 30.000.000         | 100       |
| 15 | Gorontalo           | 15.000.000           | -          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 15.000.000         | 100       |
| 16 | Nusa Tenggara Timur | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | 28.265.604         | 94        | 28.265.604         | 94        | 1.734.396          | 6         |
| 17 | Kalimantan Utara    | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 30.000.000         | 100       |
| 18 | Kalimantan Timur    | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 30.000.000         | 100       |
| 19 | Aceh                | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | 15.000.000         | 50        | 15.000.000         | 50        | 15.000.000         | 50        |
| 20 | Kepulauan Riau      | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 30.000.000         | 100       |
| 21 | Sumatera Utara      | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 30.000.000         | 100       |
| 22 | Riau                | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 30.000.000         | 100       |
| 23 | Sulawesi Tengah     | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 30.000.000         | 100       |
| 24 | Sulawesi Selatan    | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 30.000.000         | 100       |
| 25 | Sulawesi Utara      | 30.000.000           | 5          | kab/kota        | 6.443.000          | 21        | 6.445.000          | 21        | 23.555.000         | 79        |
| 26 | DKI Jakarta         | 25.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 25.000.000         | 100       |
| 27 | D.I. Yogyakarta     | 25.000.000           | 5          | kab/kota        | -                  | 0         | -                  | 0         | 25.000.000         | 100       |
|    | <b>TOTAL</b>        | <b>793.000.000</b>   | <b>127</b> | <b>kab/kota</b> | <b>111.464.604</b> | <b>14</b> | <b>111.466.604</b> | <b>14</b> | <b>681.533.396</b> | <b>86</b> |

### 3.2.2.5 KEGIATAN DIREKTUR BULAN MEI 2025

#### 1. **Workshop Konsultasi Multi-Pihak Pengendalian Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak Trans**

Sebagai bagian dari strategi nasional pengendalian faktor risiko PTM, telah diselenggarakan Workshop Konsultasi Multi-Pihak Pengendalian Konsumsi Gula, Garam,



dan Lemak Trans pada tanggal 9 Mei 2025 bertempat di Hotel Wyndham, Jakarta.

Workshop dibuka oleh Dr. Anas Ma'ruf, MKM selaku Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan Badan kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK-Kemenkes) dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian UMKM, BPOM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan, Adinkes, World Health Organization Indonesi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, BSN, Institut Pertanian Bogor, Global Health Strategies, GAIN, GAPMMI, GIMNI, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, Asosiasi PHRI, dan APRINDO.

Workshop ini bertujuan untuk identifikasi permasalahan dan menjaring masukan dari para pemangku kepentingan guna memperkuat perumusan dan implementasi kebijakan pengendalian GGL dengan melibatkan perwakilan dari Kementerian Kesehatan, akademisi, industri, organisasi masyarakat sipil, dan mitra Pembangunan. Harapannya seluruh sektor yang terlibat terus menerus bergandeng tangan untuk mengendalikan faktor risiko PTM agar dapat meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Indonesia dalam rangka Generasi Emas 2045.

Poin penting yang disepakati adalah perlu segera ditetapkan peraturan yang mengatur pembatasan kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) pada produk pangan olahan. Regulasi ini nantinya akan menjadi acuan bagi pelaku industri, serta memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas bagi semua pemangku kepentingan.

Sebagai langkah lanjutan, apabila dianggap perlu, dapat disusun peta jalan (roadmap) yang memuat strategi, tahapan implementasi, indikator capaian, serta evaluasi berkala. Roadmap ini akan menjadi panduan dalam perencanaan jangka menengah hingga jangka panjang, sehingga proses pengendalian risiko pangan olahan dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan terukur.

## **2. Mengikuti Webinar Hari Metrologi Sedunia Tahun 2025**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Metrologi Sedunia (World Metrology Day) tahun 2025 yang bertema “Pengukuran untuk Segala Masa, untuk Semua orang”, dan sekaligus memperingati 150 Tahun Konvensi Meter. Webinar ini diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan tema “Kebijakan dalam Standardisasi Produk Pangan dalam Kemasan”.

Webinar dilaksanakan secara daring pada tanggal 15 Mei 2025 dengan mengundang seluruh perwakilan dinas metrologi kab/kota di seluruh Indonesia dan pelaku usaha, serta menghadirkan narasumber dari BPOM dan Bapanas. Tujuan dari pertemuan adalah untuk mensosialisasikan terkait peraturan pelabelan produk pangan terkemas, baik pangan olahan dan pangan segar.

Dalam kesempatan ini, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan menyampaikan Kebijakan dan Standardisasi Produk Pangan Segar Dalam Kemasan.

Poin-poin penting yang disampaikan antara lain terkait ketentuan pelabelan pangan segar secara umum, keterangan labelm hal-hal yang dilarang, serta ketentuan label bagi pangan



segar yang diedarkan secara online/elektronik.

Dalam sesi diskusi, disampaikan mengenai ketentuan size label, kemasan yang dapat digunakan untuk pangan, dan ketentuan bagi UMKM. Salah satu peserta memberikan masukan terkait komponen dalam kemasan pangan yg tidak dapat dimakan, seperti silika gel. Selain itu, disampaikan bahwa ketentuan pelabelan baik olahan dan pangan segar merujuk pada ketentuan yg berlaku, namun isi label harus baik dan benar.

### 3. Menghadiri Acara Peluncuran Program "Ayo Bisnis Pangan"

Kegiatan Peluncuran Ayo Bisnis Pangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Pangan secara hybrid bertujuan untuk menumbuhkan ekosistem



wirausaha pangan yang inovatif, tangguh, dan berkelanjutan. Kemenko Pangan meluncurkan Program AYO BISNIS PANGAN yang merupakan inisiatif kolaboratif nasional guna memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Peluncuran program Ayo Bisnis Pangan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia pada tanggal 28 Mei 2025 dan dihadiri oleh Deputy Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementrian dan Lembaga Pemerintah Pusat terkait, Direktur Politeknik Negeri Lampung, Ketua Tim Koordinasi Ayo Bisnis Pangan, Forkopimda Provinsi Lampung, Asosiasi dan Organisasi Industri di bidang pangan.

Tujuan utama program Ayo Bisnis Pangan yaitu:

- Mendorong Kewirausahaan Pangan: Mengajak generasi muda untuk menjadi pelaku usaha di sektor pangan yang berkelanjutan dan inovatif
- Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional: Melalui partisipasi aktif generasi muda dalam produksi dan distribusi pangan lokal
- Menciptakan Ekosistem Usaha Pangan: Membangun jaringan usaha yang mendukung produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pangan lokal

Pemerintah berkomitmen memberikan berbagai bentuk dukungan kepada peserta program, antara lain:

- Pelatihan dan Pendampingan Usaha: Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan teknis untuk memulai dan mengembangkan usaha pangan;
- Akses Modal dan Lahan: Membantu dalam memperoleh modal usaha dan akses ke lahan pertanian atau produksi.
- Jaringan Pemasaran: Membuka akses ke pasar melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk memasarkan produk pangan lokal

Program Ayo Bisnis Pangan diharapkan dapat menjadi model keberhasilan yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia. Dengan melibatkan generasi muda dalam sektor pangan, program ini bertujuan untuk menciptakan wirausaha muda yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari hulu hingga hilir.

#### **4. Menghadiri Peluncuran dan Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sumatera Barat.**

Peluncuran dan Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Pangan diselenggarakan dalam rangka mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Kegiatan diselenggarakan pada 29 Mei 2025 dengan rangkaian acara Peninjauan Lapangan Koperasi Des/Kel Merah Putih ke 2 lokasi di Kota Padang (peternakan lebah madu galo-galo dan pengelolaan sampah sebagai peternakan maggot) dan dilanjutkan dengan Peluncuran dan Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Auditorium Gubernur Provinsi Sumatera Barat.



Pada acara kunjungan lapang, Badan Pangan Nasional ikut serta mengunjungi peternakan lebah madu galo-galo bersama Wakil Menteri Koperasi, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Wakil Walikota Padang, Plh. Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ketua DPRD Provinsi Jambi, anggota DPD RI Provinsi Jambi, serta tim Dinas Koperasi dan UKM Prov Sumbar.

Acara Peluncuran dan Dialog secara hybrid dibuka dengan sambutan dari Gubernur Sumatera Barat dan pemaparan Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Wamenkop. Pada dialog ini di refresh kembali semangat dari Bapak

Koperasi Indonesia (Dr. MUH hatta) yang berasal dari Sumatera Barat. Hadir pula pada kesempatan ini Wamendagri, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal KemenDPDT, Direktur Pidana, Kementerian Hukum, Kepala Daerah dari seluruh Kab/Kota di Sumbar, Kepala Dinas, serta Pengurus Koperasi dari berbagai wilayah di Sumbar.

Dalam dialog dan tanya jawab yang dipimpin oleh Wamenkop, disampaikan apresiasi dari Kementerian Koperasi terhadap semangat dan komitmen dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, dalam pembentukan koperasi merah putih di Sumatera Barat. Diharapkan komitmen dan dukungan dari Pemda dalam pendampingan kepada koperasi dan pengawalan hingga pengurusan dan pengesahan akta pembentukan. Di akhir sesi diberikan apresiasi bagi pemerintah Provinsi serta 3 Kab/kota terbaik di Sumatera Barat, yaitu Kab Solok, Kab Agam, dan Kota Bukittinggi.



### III.2.3. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan selama bulan Mei Tahun 2025 sesuai dengan capaian realisasi keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu:

#### 1. AEA-KOORDINASI (KOORDINASI, MONEV DAN PELAPORAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN)

Kegiatan monitoring prioritas pada program AEA Koordinasi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. **Pembahasan Draft Pedoman Sertifikasi HACPP pada SPPG dan Penjajakan Kerjasama dalam Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko Program Pemenuhan**

## Gizi Nasional

Pembahasan Draft Pedoman Sertifikasi HACPP pada SPPG dan Penjajakan Kerjasama dalam Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko Program Pemenuhan Gizi Nasional bertujuan untuk melakukan pembahasan lanjutan terhadap Draft Pedoman Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACPP) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN menyampaikan selama tahun 2025 sudah terjadi 15 kasus keracunan pangan pada program MBG dan 7 kasus terjadi dalam Bulan April 2025 pasca Idul Fitri, dengan jumlah korban yang meningkat.



Draft Pedoman saat ini telah mengakomodir hasil rapat sebelumnya tanggal 11 April 2025, diantaranya adalah 1) judul pedoman menjadi lebih umum tentang sertifikasi keamanan pangan; 2) sebelum dilakukan sertifikasi HACCP, SPPG sebaiknya melakukan sertifikasi Laik Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan,

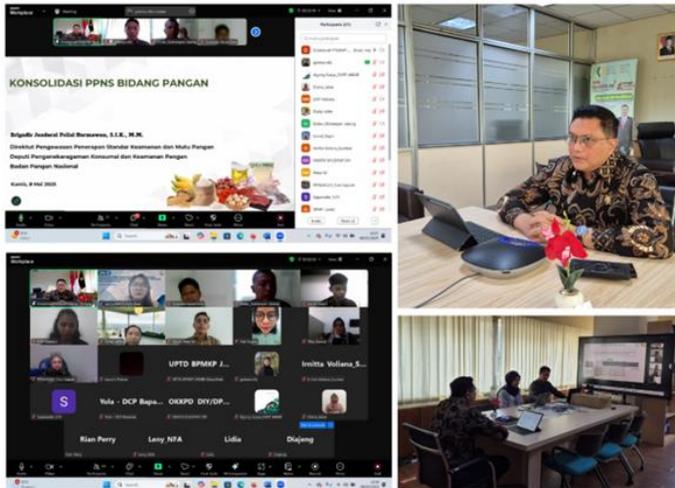
sesuai dengan tugas dan fungsi Kemkes dalam melakukan pengawasan keamanan pangan terhadap unit usaha pangan siap saji; 3) perlunya pembinaan keamanan pangan kepada SPPG sebelum dilakukan sertifikasi.

Beberapa masukan Badan Pangan terhadap draft pedoman pada pertemuan:

- 1) dokumen penyusunan HACCP memerlukan waktu dan personel dengan kompetensi, dengan tidak melupakan implementasi sanitasi saat pengolahan pangan;
- 2) sertifikasi dilakukan secara bertahap yaitu SLHS baru HACCP, bukan paket sertifikasi, dengan pertimbangan biaya dan efektivitas;
- 3) perlu pedoman implementasi sanitasi hygiene dan HACCP;
- 4) untuk lampiran baru check list untuk SLHS, belum ada check list untuk HACCP;
- 5) SPPG memiliki hak untuk melakukan sanggah terhadap temuan ketidaksesuaian hasil inspeksi; dan
- 6) jeda waktu antara pembinaan dan sertifikasi hanya 1 minggu, apakah dengan jangka waktu tersebut memungkinkan.

### **b. Koordinasi Penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pangan**

Koordinasi Penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pangan dilaksanakan secara daring dan dibuka oleh Direktur PPSKMP, serta dihadiri PPNS Bidang Pangan baik



di tingkat pusat maupun daerah sebanyak 30 orang.

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat PPNS Bidang Pangan baik di pusat maupun di daerah. Cakupan materi yang disampaikan antara lain : a) Dasar Regulasi PPNS Bidang Pangan; b) Ketentuan Pidana Pangan; c) Koordinasi Korwas dan Penyidik.

Tindak Lanjut: Direktur PPSKMP Bersama PPNS Bidang Pangan Pusat akan berkoordinasi dengan Karo Korwas PPNS Bareskrim pada Rabu, 14 Mei 2025 untuk menjamin efektivitas serta sinergi antar penegak hukum.

**c. Koordinasi ke Bareskrim dalam rangka Penguatan PPNS Badan Pangan**



Koordinasi ke Bareskrim dalam rangka Penguatan PPNS Badan Pangan. 2. Kepala Biro Korwas PPNS memberikan arahan dalam rangka penguatan PPNS Badan Pangan Nasional dibutuhkan unit kerja khusus terkait penegakan hukum tindak pidana berbentuk Deputi Penindakan. Biro Korwas PPNS berkomitmen dalam memberikan pendampingan dan pengarahan kepada 30 orang PPNS Badan Pangan yang telah dilantik dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan.

Badan Pangan Nasional perlu mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan proses penyidikan, untuk itu diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Bag Ren, Bag Wassidik dan Bag Banops, yang dalam pelaksanaan administrasi dokumen penyidikan, Direktur PPSKMP perlu memperpanjang sertifikat Penyidik. Biro Korwas PPNS akan melaksanakan Coaching kepada PPNS Badan Pangan terkait proses penyidik, utamanya pendalaman unsur pasal terkait Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

**d. Audiensi Benchmarking Penyidikan ke Deputi Penindakan BPOM**

Kunjungan audiensi Direktur PPSKMP dan PPNS diterima oleh Deputy Bidang Penindakan, Sekretaris Utama BPOM dan Direktur Cegah Tangkal BPOM di ruang kerja Deputy Bidang Penindakan.

Deputy Bidang Penindakan menyampaikan struktur organisasi pada Deputy Bidang Penindakan BPOM terdiri dari 4 Direktorat, yaitu: a) Direktorat Cegah Tangkal; b) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan; Direktorat Siber Obat dan Makanan; dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Untuk mendukung proses penyidikan yang efektif dan efisien, saat ini BPOM sedang memproses untuk penambahan 1 Direktorat yang akan melakukan penataan tahanan dan barang bukti



Sejak BPOM dibentuk pada tahun 2001, pelaksanaan fungsi Penegakan Hukum (gakum) awalnya dilaksanakan oleh unit kerja Pusat Penyidikan, namun berhubung objek yang ditangani strategis, kompleks dan luas serta untuk optimalisasi pelaksanaan fungsi gakum, maka pada tahun 2018 dibentuk Deputy Bidang Penindakan yang terdiri atas: a) Direktorat Pengamanan, b) Direktorat Intelijen dan c) Direktorat Penyidikan. Mengacu pada proses bisnis tersebut Deputy Bidang Penindakan menyampaikan Badan Pangan Nasional dapat

membentuk unit kerja penegakan hukum.

Deputy Bidang penindakan menyampaikan terkait uraian tugas dan fungsi, serta bisnis proses penindakan pada BPOM untuk dapat digunakan sebagai referensi pembentukan Deputy Penindakan pada Badan Pangan Nasional.

Direktur Cegah Tangkal menyampaikan terkait skema penganggaran penindakan pada BPOM serta merekomendasikan untuk dilakukan FGD untuk pembentukan Deputy Penindakan dengan melibatkan K/L terkait agar proses pelaksanaan dapat berjalan harmonis.

Direktur Cegah Tangkal mengingatkan diperlukan penyesuaian peraturan perundangan terkait Badan Pangan Nasional dalam tugas fungsi pelaksanaan penegakan hukum juga perlu dicantumkan agar dapat mendukung pembentukan unit kerja pada organisasi dimaksud.

#### **e. Brainstorming Strategi Optimalisasi dan Penguatan PPNS Bidang Pangan**

Brainstorming Strategi Optimalisasi dan Penguatan PPNS Bidang Pangan merumuskan strategi jangka pendek dan jangka Panjang untuk optimalisasi dan penguatan PPNS Bidang Pangan.

Sehubungan dengan belum adanya unit struktural yang menaungi secara khusus terkait penindakan tindak pidana bidang pangan di Badan Pangan Nasional maka PPNS yang telah dilantik tidak ada cantolan secara struktur organisasi sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpotensi tidak optimal.



Berdasarkan amanat Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Badan Pangan Nasional dapat dibentuk unit kerja terkait penindakan. Berhubung saat ini sedang dalam proses pengajuan revisi Perpres 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, menjadi moment untuk dapat diusulkan unit kerja penindakan pada perubahan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pangan Nasional. Namun Mengingat proses

penyusunan Revisi Perpres 66 Tahun 2021 dan Penyusunan revisi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional yang membutuhkan waktu yang cukup panjang, maka untuk saat ini dapat dibentuk Tim Kerja PPNS Bidang Pangan yang susunan keanggotaannya adalah PPNS yang sudah diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum

## **2. PCA-PERIZINAN PRODUK (SERTIFIKAT SARANA DAN PRODUK PANGAN SEGAR)**

Kegiatan monitoring prioritas pada program KRO Perizinan produk atas Sertifikasi dan registrasi dilaksanakan sebagai berikut:

### **a. Penerbitan SPPB PSAT dan Izin Edar PSAT-PL**

Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) melalui Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan mendapat amanat untuk melayani penerbitan Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) dan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL). SPPB-PSAT adalah perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higienis pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan, sedangkan Izin edar PSAT-PL merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar asal importasi yang akan diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia. SPPB-PSAT merupakan

salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan izin edar PSAT-PL.

Pada bulan Mei 2025, terdapat total 186 permohonan baru berupa 13 permohonan SPPB-PSAT dan 173 Izin Edar PSAT-PL. Permohonan yang diterbitkan OKKP-P pada bulan Mei sebesar 9 SPPB-PSAT dan 150 Izin Edar PSAT-PL sedangkan yang ditolak atau TMS sebanyak 8 SPPB-PSAT dan 14 Izin Edar PSAT-PL.

Total akumulasi permohonan yang masuk dari Januari 2025 sampai dengan Mei 2025 adalah sebanyak 178 SPPB-PSAT dan 1.378 Izin Edar PSAT-PL. Dari total 1.556 tersebut, sebanyak 873 permohonan sudah terbit dan 129 permohonan ditolak. Infografis layanan OKKP-P periode Mei 2025 dapat dilihat pada Gambar berikut.



**b. Audit Lapang SPPB-PSAT**

Dalam menerbitkan SPPB-PSAT, salah satu tahapan yang dilakukan oleh Direktorat PPSKMP sebagai verifikator adalah audit lapang. Audit lapang bertujuan untuk melakukan verifikasi penerapan dengan dokumen yang diajukan pelaku usaha serta melakukan penilaian kesesuaian sanitasi higienis sesuai standar yang berlaku. Pada bulan Mei 2025, OKKPP telah melaksanakan audit lapang terhadap 4 pelaku usaha yang menangani PSAT asal importasi dengan hasil sebagai berikut:

| NO | NAMA PERUSAHAAN | LOKASI AUDIT | TANGGAL AUDIT |
|----|-----------------|--------------|---------------|
|----|-----------------|--------------|---------------|

|   |                             |                |             |
|---|-----------------------------|----------------|-------------|
| 1 | PT Senyue Perkasa Indonesia | Kota Tangerang | 2 Mei 2025  |
| 2 | CV Inti Segar Lestari       | Kota Surabaya  | 8 Mei 2025  |
| 3 | PT Sahaabt Buah Indonesia   | Kota Surabaya  | 9 Mei 2025  |
| 4 | PT Jatinusa Jiwa Mahakarya  | Kab Bekasi     | 22 Mei 2025 |

### **c. Sidang Komisi Teknis**

Salah satu proses penerbitan SPPB dilaksanakan penilaian melalui rapat komtek bertujuan untuk memberi rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penerapan Sanitasi Higienis Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT), sehingga penerbitan melalui audit menjadi lebih obyektif, professional dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan semua auditor dapat memaparkan secara utuh gambaran masing-masing unit usaha yang telah diaudit, dan tim komtek dapat memberikan rekomendasi yang sesuai. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan masukan terhadap penilaian proses penerbitan SPPB, pada bulan Mei 2025 telah dilaksanakan Komisi Teknis OKKPP pada 19 Mei 2025 secara hybrid.

Pelaku usaha yang diajukan pada rapat Komtek 19 Mei 2025 berjumlah 13 (tiga belas) pelaku usaha yaitu:

1. PT Enes Agribisnis Indonesia
2. CV Lam Hong
3. PT Indokharisma Pangan Semesta
4. PT Agung Makmur Lestari
5. PT Intisehat Prima Makmur
6. PT Indoribbon Bungamas Abadi
7. CV Sido Makmur Sejahtera
8. PT Metta Sinar Sejahtera
9. PT Setia Pesona Indoagro
10. PT Hajar Aswad Tani
11. PT Sumber Roso Agromakmur
12. PT Classic Fine Foods
13. PT Indah Bestari Permai

Penilai atau pakar yang hadir dalam komtek 19 Mei 2025 yaitu: 1) Universitas Gadjah Mada oleh Prof. Dr. Ir. Sri Rahardjo, M.Sc; 2) Institut Teknologi Bandung oleh Prof. Dr. rer.nat. Rahmana Emran Kartasasmita, M.Si; 3) BRIN oleh Dr. Tri Joko Santoso, S.P., M.Si.; Badan Karantin Indonesia oleh Nina Marlina A., STP, MSc; 4) BRIN oleh Mulyana Hadipernata, S.T.P, M.Sc., PhD.; 5) OKKP Pusat oleh Netra Mirawati, SP, MP dan Tuty Anna Samosir, S.P., M.M.

Berdasarkan hasil pembahasan, Tim Komisi Teknis OKKP-P sepakat untuk merekomendasikan kepada Ketua OKKP-P agar menerbitkan SPPB-PSAT bagi seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Sidang Komisi Teknis pada 19 Mei 2025. Namun, sebelum penerbitan, pelaku usaha harus terlebih dahulu melengkapi perbaikan yang disarankan oleh Komisi Teknis OKKP-P.



**d. Rapat Pembahasan Rancangan Pedoman Sertifikasi Prima**



Rapat Pembahasan Rancangan Pedoman Sertifikasi Prima bertujuan untuk mendapatkan masukan yang komprehensif terhadap Konsep Pedoman Sertifikasi Prima yang akan digunakan sebagai acuan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Daerah dalam melaksanakan sertifikasi.

Sertifikasi prima bersifat sukarela dan diberikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kompleksitas penerapan sistem budi daya pangan segar berdasarkan kemampuan

pelaku usaha. Skema Sertifikasi Prima dibedakan menjadi sertifikasi Prima 3 (aman), Prima 2 (aman dan bermutu) dan Prima 1 (aman, bermutu dan ramah lingkungan).

Persyaratan administrasi dan teknis untuk Sertifikasi Prima 3, 2 dan 1 sudah disepakati dan akan dituangkan narasinya lebih lanjut dalam batang tubuh pedoman, kemudian penambahan ruang lingkup budidaya selain menggunakan media tanah (hidroponik) dan disusunnya Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Penjaminan Keamanan Pangan melalui Sertifikasi Prima.

### **3. QIA-PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUK**

Kegiatan monitoring prioritas pada program KRO Pengawasan Dan Pengendalian Produk (QIA) atas Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan dan Mutu Pangan dilaksanakan sebagai berikut:

#### **a. Rapat Persiapan Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia (KHPS) Tahun 2025**



Rapat Persiapan Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia (KHPS) Tahun 2025 bertujuan untuk memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day (WFSD) yang jatuh setiap tanggal 7 Juni, maka pada tahun 2025 ini diusung tema yaitu food safety: "Science in Action", dan tema Nasional adalah Peran Penting Sains Dalam Keamanan Pangan.

Peringatan WFSD merupakan cara penting untuk: 1) masyarakat semakin sadar akan masalah keamanan pangan; 2) masyarakat mengetahui cara mencegah keamanan pangan; 3) koordinasi yang lebih baik dengan lintas sektor bagaimana pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan keamanan pangan; 4) promosi solusi dan cara untuk membuat pangan lebih aman.

## b. Pengawasan SPPG Program MBG

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim dari Badan Pangan Nasional dan DKPP Kota Bogor di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal Yayasan Perjuangan Untuk Kesejahteraan Rakyat (PKR) dan SPPG Bogor Timur Yayasan Melati Sindangrasa (MS). SPPG pada kedua yayasan ini menyediakan ± 3000 porsi makanan per hari untuk sekolah TK, SD, SMP, dan SMA serta posyandu di Kota Bogor.



Tim yang terlibat pada kedua SPPG ini meliputi Ketua SPPG, ahli gizi, dan purchasing & accounting serta relawan yang bertugas sebagai stockiest, chef, prepare dan lainnya. SPPG Yayasan PKR memperoleh bahan baku pangan segar dari koperasi, sedangkan Yayasan MS dari Usaha Dagang (UD) yang ditunjuk oleh yayasan dan berada di area Bogor.

Dapur SPPG Yayasan PKR dan MS secara keseluruhan telah memiliki sanitasi higiene yang cukup baik, serta fasilitas yang memadai seperti ruang penyimpanan khusus, chiller dan freezer. Pada SPPG Yayasan PKR perlu dilakukan penataan terkait kegiatan pencucian peralatan yg tidak pada tempatnya dan dilakukan berdekatan dengan area produksi sehingga dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi silang;

Pengujian menggunakan rapid test dengan uji residu pestisida dilakukan pada Yayasan MS pada komoditas wortel, daun bawang dan pokcoy dengan hasil seluruhnya negatif, sedangkan pada Yayasan PKR tidak dilakukan rapid test karena bahan baku belum datang dari supplier dan tidak terdapat stok pada saat itu. Berdasarkan diskusi terdapat keluhan terkait sayur yang kurang beragam krn siswa cenderung makan sayur tertentu dan kurang tertarik pada sayur yg lain sehingga diperlukan alternatif menu dan edukasi kepada siswa sehingga bisa memotivasi siswa untuk makan sayur yg beragam.

**c. Pengawasan Keamanan Pangan Segar Produk Cabai**

Kegiatan pengawasan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat (Kab Bandung, Kab Tasikmalaya dan Kab Sukabumi); Provinsi Jawa Tengah (Kab Semarang, Kab.Boyolali, Kab Temanggung dan Kab Magelang) dan; Jawa Timur (Kota Surabaya, Kab Tuban, Kab Malang dan Kab Lumajang) oleh tim Direktorat PPSKMP.

Kegiatan pengawasan mencakup pengujian rapid test, pengambilan cabai sejumlah 3 (tiga) sampel dari masing-masing lokasi yang selanjutnya akan diuji di laboratorium terakreditasi. Sampel cabai yang diambil adalah sampel dengan hasil positif ketika diuji menggunakan Rapid Test Pestisida. Selain itu, telah dilaksanakan pengambilan sampel Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) yaitu ikan asin dan ikan teri di Kab.Tuban sebagai tindak lanjut dari pengawasan cemaran formalin pada PSAI yang beredar. Hasil uji dengan rapid test menunjukkan hasil yang positif. Atas hasil pengawasan tersebut, tim telah mensosialisasikan pentingnya keamanan pangan segar kepada produsen/pedagang, serta mendorong para produsen/pedagang untuk menerapkan good practices dalam melakukan usaha pangan.



## **BAB IV PENUTUP**

### **IV.1 Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada periode bulan Mei Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan DIPA awal Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Rp. 40.284.839.000.- dimana terdapat blokir sehingga anggaran menjadi Rp 28.391.400.000,-.
2. Realisasi keuangan pada bulan Mei 2025 adalah sebesar Rp. 0,18% atau 0,13% dari pagu anggaran pada DIPA awal 2025. Dengan kata lain, realisasi keuangan sampai dengan bulan Mei tahun 2025 sebesar Rp. 51.117.845 atau sebesar 0,18% dari Pagu DIPA setelah dikurang blokir.

### **IV.2 Permasalahan**

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, namun demikian keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama bulan Mei Tahun 2025.

### **IV.3 Rekomendasi**

Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan ke depan, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal palang kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Lembar III DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2025**



DIS-4126-7004-6290-1646

**III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL  
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE           | URAIAN SATKER  | RENCANA PENARIKAN |           |            |            |               |            |            |            |            |            |            |             | JUMLAH SELURUH |
|----|----------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
|    |                |  | JANUARI           | FEBRUARI  | MARET      | APRIL      | MEI           | JUNI       | JULI       | AGUSTUS    | SEPTEMBER  | OKTOBER    | NOVEMBER   | DESEMBER    |                |
| 1  | 2              | 3  | 4                 | 5         | 6          | 7          | 8             | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15          | 16             |
| 1  | 690590         | <b>BADAN PANGAN NASIONAL</b>   |                   |           |            |            |               |            |            |            |            |            |            |             |                |
|    |                | <b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>  | 2.436.542         | 7.498.672 | 12.985.352 | 45.611.271 | 2.502.241.927 | 15.021.859 | 16.689.426 | 16.454.358 | 18.924.889 | 18.865.617 | 16.668.643 | 127.869.365 | 2.801.268.022  |
|    |                | <b>BELANJA PEGAWAI</b>   | 1.604.119         | 3.800.668 | 7.871.807  | 3.800.069  | 3.800.069     | 7.871.807  | 5.800.668  | 5.800.668  | 5.225.430  | 6.225.431  | 5.651.702  | 4.800.668   | 62.254.302     |
|    |                | <b>BELANJA BARANG</b>  | 830.077           | 3.659.577 | 5.048.946  | 41.712.196 | 2.497.419.226 | 6.632.999  | 10.647.108 | 10.435.462 | 10.744.765 | 10.833.538 | 10.770.161 | 115.834.356 | 2.724.568.416  |
|    |                | <b>BELANJA MODAL</b>   | 2.348             | 38.426    | 64.600     | 96.406     | 1.022.032     | 517.052    | 241.650    | 218.227    | 2.954.792  | 1.806.848  | 246.780    | 7.234.339   | 14.445.304     |
|    | 125.01.HA.8875 | Pemantapan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan          | 307.757           | 1.039.872 | 1.393.082  | 37.769.968 | 2.492.443.022 | 1.535.731  | 2.655.209  | 2.791.478  | 2.594.328  | 2.565.012  | 2.631.478  | 44.514.822  | 2.592.242.209  |
|    |                | 52 BELANJA BARANG DAN JASA   | 307.757           | 1.034.632 | 1.371.448  | 37.743.287 | 2.482.415.162 | 1.507.267  | 2.587.830  | 2.732.509  | 2.537.543  | 2.506.164  | 2.579.698  | 44.041.006  | 2.591.370.259  |
|    |                | 53 BELANJA MODAL   | 0                 | 5.240     | 21.634     | 26.681     | 28.437        | 28.434     | 57.379     | 58.966     | 56.784     | 58.848     | 55.780     | 473.814     | 872.000        |
|    | 125.01.HA.8876 | Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 0                 | 0         | 216.976    | 653.579    | 890.466       | 890.466    | 2.325.037  | 1.810.466  | 5.068.231  | 1.825.770  | 1.959.025  | 38.376.982  | 53.577.000     |
|    |                | 52 BELANJA BARANG DAN JASA   | 0                 | 0         | 216.976    | 650.027    | 887.794       | 887.794    | 2.325.037  | 1.781.700  | 2.387.668  | 1.772.257  | 1.933.573  | 34.685.782  | 46.968.000     |
|    |                | 53 BELANJA MODAL   | 0                 | 0         | 960        | 2.951      | 2.672         | 2.242      | 59.480     | 48.766     | 2.781.162  | 93.514     | 25.452     | 3.691.199   | 6.668.400      |
|    | 125.01.HA.8877 | Pemantapan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan                 | 51.117            | 149.486   | 468.956    | 653.702    | 857.222       | 880.477    | 1.320.038  | 1.308.540  | 1.389.201  | 3.186.450  | 1.456.429  | 28.583.210  | 40.284.839     |
|    |                | 52 BELANJA BARANG DAN JASA   | 51.117            | 149.409   | 463.962    | 652.417    | 856.881       | 832.108    | 1.272.074  | 1.288.359  | 1.341.720  | 3.153.843  | 1.371.122  | 28.731.206  | 36.476.229     |
|    |                | 53 BELANJA MODAL   | 0                 | 277       | 5.295      | 30.289     | 30.241        | 48.369     | 47.464     | 50.181     | 47.464     | 1.612.606  | 85.307     | 1.852.011   | 3.809.600      |
|    | 125.01.WA.8874 | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional              | 2.077.669         | 6.309.314 | 10.906.341 | 6.534.021  | 8.250.616     | 11.955.184 | 10.389.142 | 10.543.874 | 9.873.230  | 11.308.385 | 10.621.710 | 16.394.339  | 115.163.827    |
|    |                | 51 BELANJA PEGAWAI   | 1.604.119         | 3.800.668 | 7.871.807  | 3.800.069  | 3.800.069     | 7.871.807  | 5.800.668  | 5.800.668  | 5.225.430  | 6.225.431  | 5.651.702  | 4.800.668   | 62.254.302     |
|    |                | 52 BELANJA BARANG DAN JASA   | 471.202           | 2.475.736 | 2.967.822  | 2.694.805  | 3.489.266     | 3.645.371  | 4.511.148  | 4.682.894  | 4.578.416  | 5.001.274  | 4.889.768  | 10.376.356  | 49.814.218     |

**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL  
 Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode/Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 2  
(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE | URAIAN SATKER    | RENCANA PENARIKAN |          |        |        |         |         |        |         |           |         |          |           | JUMLAH SELURUH |
|----|------|------------------|-------------------|----------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|-----------|---------|----------|-----------|----------------|
|    |      |                  | JANUARI           | FEBRUARI | MARET  | APRIL  | MEI     | JUNI    | JULI   | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER  |                |
| 1  | 2    | 3                | 4                 | 5        | 6      | 7      | 8       | 9       | 10     | 11      | 12        | 13      | 14       | 15        | 16             |
|    |      | 53 BELANJA MODAL | 2.348             | 32.909   | 36.712 | 38.489 | 960.582 | 438.006 | 77.327 | 83.312  | 69.384    | 81.681  | 80.240   | 1.217.315 | 3.095.304      |

Jakarta, 02 Desember 2024  
Kepala Badan Pangan Nasional

ss  
Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c)  
NIP. 197411272022211000

**Lampiran 2. Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan Mei Tahun 2025 Sesuai Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan**

| Program, Kegiatan, KRO, RO   |   | Jumlah Pagu           |                       | REALISASI s.d Mei 2025 |              |              | Sisa Anggaran         |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
|  |   | DIPA Awal             | REVISI                | SP2D                   | % DIPA       | % Revisi     |                       |
| <b>HA.6877 Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan</b> |   | <b>40.284.839.000</b> | <b>28.391.400.000</b> | <b>51.117.845</b>      | <b>0,13%</b> | <b>0,18%</b> | <b>28.340.282.155</b> |
| <b>ABR</b>   | <b>Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan</b>   | <b>1.243.760.000</b>  | <b>794.580.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>794.580.000</b>    |
| ABR.002  | Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan  | 1.243.760.000         | 794.580.000           | 0                      | 0,00%        | 0,00%        | 794.580.000           |
| <b>AEA</b>   | <b>Koordinasi</b>   | <b>17.349.130.000</b> | <b>11.628.217.000</b> | <b>4.498.500</b>       | <b>0,03%</b> | <b>0,04%</b> | <b>11.623.718.500</b> |
| AEA.001  | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Panganekaragaman Konsumsi Pangan                         | 7.860.000.000         | 1,635,382,000         | 537,078,465            | 6.83%        | 32.84%       | 1,098,303,535         |
| AEA.002  | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 4.628.480.000         | 3.315.925.000         | 0                      | 0,00%        | 0,00%        | 3.315.925.000         |
| AEA.003  | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan    | 4.860.650.000         | 391.010.000           | 89.380.406             | 1.84%        | 22.86%       | 301.629.594           |

| Program, Kegiatan, KRO, RO |  | Jumlah Pagu          |                      | REALISASI s.d Mei 2025 |              |               | Sisa Anggaran        |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------------|
|                            |  | DIPA Awal            | REVISI               | SP2D                   | % DIPA       | % Revisi      |                      |
| <b>AFA</b>                 | <b>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</b>  | <b>1.900.000.000</b> | <b>1.129.747.000</b> | <b>46.619.345</b>      | <b>2,45%</b> | <b>4,13%</b>  | <b>1.083.127.655</b> |
| AFA.001                    | NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan  | 600.000.000          | 46,825,000           | 46,619,345             | 7.77%        | 99.56%        | 205,655              |
| AFA.002                    | NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan         | 1.000.000.000        | 563.375.000          | 0                      | 0,00%        | 0,00%         | 563.375.000          |
| AFA.003                    | NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan   | 300.000.000          | 211.400.000          | 0                      | 0,00%        | 0,00%         | 211.400.000          |
| <b>BDG</b>                 | <b>Fasilitasi dan Pembinaan UMKM</b>   | <b>2.000.000.000</b> | <b>1,176,595,000</b> | <b>1,490,000</b>       | <b>0.07%</b> | <b>0.13%</b>  | <b>1.764.450.000</b> |
| BDG.001                    | UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan                             | 2.000.000.000        | 1,176,595,000        | 1,490,000              | 0.07%        | 0.13%         | 1,175,105,000        |
| <b>PCA</b>                 | <b>Perizinan Produk</b>  | <b>2.500.000.000</b> | <b>722.860.000</b>   | <b>119.415.892</b>     | <b>4,77%</b> | <b>16.52%</b> | <b>603.444.108</b>   |
| PCA.001                    | Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan | 2.500.000.000        | 722.860.000          | 119.415.892            | 4,77%        | 16.52%        | 603.444.108          |
| <b>PEH</b>                 | <b>Promosi</b>   | <b>3.500.000.000</b> | <b>74,550,000</b>    | <b>237,265,219</b>     | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  | <b>838,134,781</b>   |

| Program, Kegiatan, KRO, RO |  |   | Jumlah Pagu          |                      | REALISASI s.d Mei 2025 |              |               | Sisa Anggaran        |
|----------------------------|--|---|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------------|
|                            |  |   | DIPA Awal            | REVISI               | SP2D                   | % DIPA       | % Revisi      |                      |
| PEH.001                    |  | Promosi Pangan B2SA   | 3.500.000.000        | 74,550,000           | 237,265,219            | 6.78%        | 22.06%        | 838,134,781          |
| <b>QDB</b>                 |  | <b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>                         | <b>2.404.489.000</b> | <b>1.214.209.000</b> | <b>0</b>               | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  | <b>1.214.209.000</b> |
| QDB.001                    |  | Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman                | 904.729.000          | 60.100.000           | 12.490.106             | 1.38%        | 20.78%        | 47.609.894           |
| QDB.002                    |  | Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina                   | 1.499.760.000        | 749.880.000          | 0                      | 0,00%        | 0,00%         | 749.880.000          |
| <b>QDD</b>                 |  | <b>Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat</b>             | <b>684.460.000</b>   | <b>14,578,998</b>    | <b>7,992,000</b>       | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  | <b>108,258,000</b>   |
| QDD.001                    |  | Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan | 684.460.000          | 14,578,998           | 7,992,000              | 1.17%        | 6.87%         | 108,258,000          |
| <b>QIA</b>                 |  | <b>Pengawasan dan Pengendalian Produk</b>                       | <b>2.998.000.000</b> | <b>1.389.630.000</b> | <b>192.094.769</b>     | <b>6,41%</b> | <b>13,82%</b> | <b>1.197.535.231</b> |
| QIA.002                    |  | Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan      | 2.998.000.000        | 1.389.630.000        | 192.094.769            | 6,41%        | 13,82%        | 1.197.535.231        |
| <b>QMA</b>                 |  | <b>Data dan Informasi Publik</b>                                | <b>1.500.000.000</b> | <b>356,010,000</b>   | <b>0</b>               | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  | <b>356,010,000</b>   |
| QMA.001                    |  | Data Situasi Konsumsi Pangan                                    | 1.500.000.000        | 356,010,000          | 0                      | 0,00%        | 0,00%         | 356,010,000          |

| Program, Kegiatan, KRO, RO |  | Jumlah Pagu          |                      | REALISASI s.d Mei 2025 |              |              | Sisa Anggaran        |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|
|                            |  | DIPA Awal            | REVISI               | SP2D                   | % DIPA       | % Revisi     |                      |
| <b>RAG</b>                 | <b>Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b> | <b>4.205.000.000</b> | <b>2.225.000.000</b> | <b>0</b>               | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>2.225.000.000</b> |
| RAG.001                    | Sarana Keamanan dan Mutu Pangan                                | 4.205.000.000        | 2.225.000.000        | 0                      | 0,00%        | 0,00%        | 2.225.000.000        |

